

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATDAK

Edisi Desember II Tahun 2024 No. 54

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif|Atdak|Substantif



Fraksi PKS DPR RI

Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

di Markas PBB



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Indonesia Milik Kita Semua

Bukan perbedaannya yang menjadi fokus kita tapi persatuan kita untuk mengokohkan ke-Indonesia-an. Itu mengapa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka adalah kekayaan kita, Tunggal Ika adalah cara kita membesarkan dan memajukan Indonesia.

Indonesia ini milik kita semua. Titik temu kebangsaan kita bernama Pancasila yang diterjemahkan dalam Konstitusi UUD 1945. Kita boleh berbeda suku, ras, agama, dan antargolongan, tapi kita hidup sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air: Indonesia. Pancasila adalah pedoman kita untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) di bumi Allah bernama Indonesia.

Perbedaan adalah sunnatulloh, bahkan satu diantara anugerah Allah Swt. Allah berfirman dalam Al-Qur'an

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal..." (Al-Hujurat: 13).

Bukan perbedaan-nya yang menjadi fokus kita tapi persatuan kita untuk mengokohkan ke-Indonesia-an. Itu mengapa kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka adalah kekayaan kita, Tunggal Ika adalah cara kita membesarkan dan memajukan Indonesia.

Bangsa ini bangsa besar

dalam seluruh aspeknya: wilayahnya, sumber daya alamnya, suku bangsanya, bahasanya, adat istiadatnya, agamanya, dan alam pikiran manusianya. Dalam kebesaran Indonesia tersebut, kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh merasa paling hebat sendiri, tidak boleh merasa paling Pancasila dan NKRI. Sikap yang demikian hanya akan memecah-belah, mensegregasi, menimbulkan disharmoni dan akhirnya disintegrasi bangsa.

Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian.

Bangsa ini akan menjadi besar dan maju jika kita saling bekerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi tanpa memandang suku, ras, agama, golongan dan status atau strata sosial ekonomi. Inilah yang kita sebut persatuan Indonesia. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan contoh bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan persatuan dan bukan dengan perpecahan.

Mari kita hentikan sikap permusuhan, memecah-belah, menyebarkan fitnah, hoax dan kebencian (hate speech) di antara sesama anak bangsa.

Sikap tersebut bukan saja tidak berfaedah, tapi lambat laun menjerumuskan bangsa ini pada kehancuran dan negara gagal (failed state). Sikap tersebut juga sangat jelas dilarang agama dan dibenci Allah Swt. Mari kita kembali pada jati diri bangsa kita yang ramah, sopan santun, tenggang rasa, tepo seliro, dan gotong royong.

Hidup bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekali lagi, Indonesia milik kita semua. Merdeka. Allahu Akbar!!



image istimewa

Fraksi PKS DPR RI Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak ke Markas PBB

New York (14/12) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memimpin Delegasi Fraksi PKS mendatangi Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York untuk membahas agenda perlindungan dan kesejahteraan anak.

Delegasi Fraksi PKS menemui Perwakilan Khusus Sekjen PBB (SRSG) Untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General for Violence Against Children.

Pertemuan itu membahas agenda perlindungan dan kesejahteraan anak meliputi masalah-masalah kesehatan, pendidikan, serta kemajuan anak-anak di berbagai negara khususnya di Indonesia untuk mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik dan ramah untuk anak.

Dalam sambutannya, Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS DPR RI memiliki kepedulian yang besar terhadap isu dan permasalahan anak-anak sebagai generasi masa depan dunia.

Maju mundurnya dunia dan peradaban umat manusia ada di tangan mereka sebagai generasi masa depan. Maka kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan tempat terbaik bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak di muka bumi.

Sebagai bagian dari Parlemen, Fraksi PKS memiliki

peran besar dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan memastikan akuntabilitas kebijakan untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia serta mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak.

"Sementara dalam kerangka kebijakan global, Fraksi PKS juga aktif mendorong kerjasama dan kolaborasi diantara negara-negara dan organisasi internasional dalam mewujudkan kualitas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak baik di Indonesia maupun di berbagai negara," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

Fraksi PKS DPR RI memandang Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan terhadap anak bersama-sama dengan UNICEF memiliki peran dan tugas mulia untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak-anak di dunia.

Melalui peran badan ini serta peran PBB secara luas kami ingin upaya untuk melin-

BERIKUTNYA >>>

Fraksi PKS DPR RI Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak ke Markas PBB

« SEBELUMNYA

dungi, mencerdaskan, menyelamatkan, dan menyejahterakan anak-anak di dunia terus diperjuangkan dan menjadi prioritas pembangunan global. Untuk itu, seluruh komponen dunia harus bergandengan tangan, bekerjasama, dan berkolaborasi mewujudkan.

"Fraksi PKS mengapresiasi dan terus mendukung Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Untuk Isu Kekerasan terhadap Anak yang bersama-sama badan lain seperti UNICEF melakukan berbagai upaya advokasi, perlindungan, dan pemajuan kesejahteraan bagi anak-anak di berbagai negara

serta terus mengupayakan agar anak menjadi prioritas kebijakan global," tegasnya.

Diketahui, delegasi Fraksi PKS yang terdiri dari Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam, Anggota Komisi I Habib Idrus Al Jufri, Anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, Anggota Komisi VI Ismail Bachtiar, Anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani dan Muhammad Haris, serta Anggota Komisi XIII Meity Rahmatia, bertemu dengan Pablo Espinella dari Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB.

Delegasi disambut oleh Duta Besar LBBP Wakil Tetap RI Untuk PBB New York/Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha

Nasir dan didampingi Deputi Wakil Tetap RI Untuk PBB New York Duta Besar Hari Prabowo.

Sementara itu, Perwakilan Khusus Sekjen PBB (SRSG) Untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak mengapresiasi kepedulian Fraksi PKS terhadap permasalahan anak-anak baik spesifik terkait kekerasan maupun secara umum terkait kesejahteraan anak.

Pablo Espinella dari SRSG PBB memiliki pandangan dan pemahaman yang sama dengan Fraksi PKS tentang pentingnya perlindungan dan penyelamatan anak-anak dari berbagai tindak kekerasan atas nama apapun serta bagaimana mewujudkan dunia yang ramah anak, dunia yang memajukan kesejahteraan anak-anak.

Oleh karena itu, Perwakilan Khusus Sekjen PBB Untuk Isu Kekerasan Terhadap Anak akan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk mengagendakan kunjungan ke berbagai negara untuk berdiskusi dengan seluruh stakeholder terkait dari pemerintahan termasuk parlemen.

Peran parlemen semakin penting dalam beberapa tahun belakangan khususnya dalam meratifikasi hak anak serta implementasinya di lapangan, persetujuan program dan anggaran serta penyediaan infrastruktur terkait kehidupan anak.

Perwakilan Khusus Sekjen PBB secara khusus mengapresiasi Indonesia karena tergarbang



"Fraksi PKS mengapresiasi dan terus mendukung Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Untuk Isu Kekerasan terhadap Anak yang bersama-sama badan lain seperti UNICEF melakukan berbagai upaya advokasi, perlindungan, dan pemajuan kesejahteraan bagi anak-anak di berbagai negara serta terus mengupayakan agar anak menjadi prioritas kebijakan global

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Anggota Komisi I DPR RI

dalam 40 negara aliansi global untuk akselerasi penanganan persoalan kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, dan

pemajuan kesejahteraan anak dalam rangka pencapaian SDGs 2030 yang tinggal 5 tahun lagi.



Habib Idrus: Indonesia dan PBB Harus Bersinergi Atasi Cyberbullying pada Anak

New York (14/12) — Dalam diskusi yang berlangsung di kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Al-Jufri menyerukan kepada PBB

untuk memprioritaskan penanganan masalah cyberbullying yang kian mengancam anak-anak, khususnya di Indonesia dan di dunia pada umumnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh 8 Anggota DPR RI dari Fraksi PKS serta perwakilan dari kantor Special Representative of the Secretary-General (SRSG) bidang Kekerasan terhadap Anak, Pablo Espinella, yang menyampaikan komitmen PBB untuk mendukung langkah-langkah konkret menangani isu cyberbullying.

"Cyberbullying adalah ancaman nyata yang semakin sering terjadi di Indonesia. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk interaksi positif, kini sering menjadi tempat intimidasi, tekanan sosial, dan kekerasan digital yang me-

rusak kesehatan mental anak-anak kita," tegas Habib Idrus.

Menurut laporan CDC 2022, bunuh diri telah menjadi penyebab kematian kedua tertinggi di kalangan remaja, dengan cyberbullying sebagai salah satu penyebab utama.

Situasi ini, imbuhnya, membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Usulan Langkah Konkret dari Delegasi DPR RI

Dalam diskusi tersebut, Habib Idrus mengajukan beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan.

"Pertama, Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial. Kami mendorong kesepakatan global untuk membatasi akses

media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun demi melindungi mereka dari konten tidak pantas dan kekerasan digital," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Kedua, lanjut Idrus, Regulasi Platform Digital. Pihaknya mendesak tanggung jawab lebih besar dari platform media sosial untuk memantau dan menangani kasus cyberbullying secara cepat dan tegas.

"Ketiga yakni Pendidikan Literasi Digital. Saya mengusulkan kampanye global untuk meningkatkan literasi digital bagi anak-anak, orang tua, dan pendidik agar mampu memahami dan mengurangi risiko di dunia digital," terang Habib Idrus.

Dukungan dari PBB

Pablo Espinella, yang mewakili SRSG bidang Kekerasan terhadap Anak, menyambut baik rekomendasi tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara negara-negara anggota PBB.

"Kami siap mendukung langkah-langkah Indonesia dan negara-negara lainnya untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak,"



"Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cyberbullying adalah krisis global yang membutuhkan respons bersama dari semua pihak. Keselamatan anak-anak adalah prioritas kita,"

HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A.

Anggota Komisi I DPR RI

ujarnya.

Solidaritas Delegasi PKS Delapan anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang hadir dalam pertemuan ini menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah global yang bertujuan melindungi anak-anak dari ancaman cyberbullying.

Mereka juga menegaskan komitmen Indonesia dalam me-

ndukung kebijakan internasional yang sejalan dengan nilai-nilai perlindungan anak.

"Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cyberbullying adalah krisis global yang membutuhkan respons bersama dari semua pihak. Keselamatan anak-anak adalah prioritas kita," pungkas Habib Idrus.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Kreatif Atraktif Substantif

 fraksi.pks.id

 [fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)

 [@fpksdprri](https://twitter.com/fpkspdprri)

 [Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)

 [PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/PKSTV_DPR_RI)



**Dr. H.
Sukamta**
Wakil Polhukam

**Drs. H. Adang
Daradjatun**
Wakil Kneja

**Ismail Bachtar,
S.K.M., M.M.**
Wakil Bendahara

**Dr. Hj. Kurniasih
Mufidayati, M.Si.**
Bendahara

**Dr. H. Jazuli
Juwaini, M.A.**
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. Ledja Hanifa A.,
S.Si., M.PsIc.**
Sekretaris

**Habib Idrus Salim
Aijufri, Lc., M.B.A**
Wakil Sekretaris

**Dr. Hj. Netty
Prasetyani, M.Si**
Wakil Ketua

**Amin,
Ak., M.M.**
Wakil Inang

**H. Ecky Awal
Mucharam**
Wakil Eksek



Politisi PKS Kecam Israel yang Kembali Kuasai Dataran Tinggi Golan Suriah

Jakarta (12/12) --- Memanfaatkan situasi politik yang sedang berubah di Suriah dengan tumbangnya pemerintah Bashar Al Assad, Perdana Menteri Netanyahu memerintahkan pasukan Israel merebut zona penyangga di Dataran Tinggi Golan

Netanyahu kembali menyatakan wilayah Suriah, Dataran Tinggi Golan, menjadi milik Israel.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, mengecam keras sikap Netanyahu untuk menguasai kembali Dataran Tinggi Golan. Menurutnya, Dataran Tinggi Golan adalah wilayah kedaulatan Suriah, yang harus dihormati.

"Tindakan Israel ini jelas ilegal, melanggar hukum internasional. Setiap negara harus menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Prinsip dalam Piagam PBB mengatur penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara. Selain itu terdapat pengakuan internasional atas wilayah Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Suriah sebagaimana terkandung dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 tahun 1967, nomor 338 tahun 1973 dan nomor 497 tahun 1981," jelas Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.

Sukamta menyebut tindakan ilegal Israel menguasai Dataran Tinggi Golan akan memperburuk situasi di Timur

Tengah. Sukamta menduga Israel mencoba mengalihkan isu genosida yang terus mereka lakukan di Gaza Palestina dengan memanfaatkan situasi perubahan politik di Suriah. Namun demikian tindakan Israel ini malah akan jadi bumerang dan semakin menunjukkan watak asli Israel sebagai bangsa penjajah.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini berharap Pemerintah Indonesia

segera menyikapi perkembangan situasi di Suriah terutama terkait upaya Israel menduduki Dataran Tinggi Golan. Menurutnya perlu ada tekanan internasional untuk menghentikan Israel.

"Sudah belasan tahun Suriah mengalami masa sulit karena perang saudara. Jatuhnya rezim Assad, membawa harapan baru bagi masyarakat Suriah. Jangan sampai ini dirusak dengan tindakan ilegal Israel kuasai Dataran Tinggi Golan. Hal ini bisa mengancam proses perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh sebab itu Indonesia perlu mengajak negara-negara yang tergabung dalam OKI untuk mendesak DK PBB menghentikan tindakan ilegal Israel," tutup Sukamta.

"Sudah belasan tahun Suriah mengalami masa sulit karena perang saudara. Jatuhnya rezim Assad, membawa harapan baru bagi masyarakat Suriah. Jangan sampai ini dirusak dengan tindakan ilegal Israel kuasai Dataran Tinggi Golan. Hal ini bisa mengancam proses perdamaian dan stabilitas kawasan.

Oleh sebab itu Indonesia perlu mengajak negara-negara yang tergabung dalam OKI untuk mendesak DK PBB menghentikan tindakan ilegal Israel,"

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI



image istimewa

Wakil Ketua Komisi I FPKS Apresiasi Upaya Pemerintah Evakuasi WNI di Suriah

Jakarta (17/12) — Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan, mengapresiasi upaya dan langkah pemerintah,

dalam mengevakuasi WNI di Suriah pasca tumbangnyanya rezim Bashar Al-Assad.

Sebagaimana data terhimpun terdapat sekitar 1.162 WNI ya-ng tersebar di

berbagai wilayah, mayoritas di Damaskus dan se-kitarnya serta diketahui sebagian besar adalah pekerja migran.

"Pasca penggulingan Bashar al-Asaad, kondisi ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam evakuasi WNI tersebut," ungkap Kang Aher disela-sela wawancara awak media.

Lebih lanjut, Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini mendukung Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah langkah strategis untuk melindungi ribuan WNI di Suriah pasca penggulingan Bashar al-Assad seperti menetapkan status siaga dan pemantauan keamanan; penyusunan rencana kontingensi; kerja sama dengan Otoritas Internasional; repatriasi selektif; serta imbauan dan dukungan konsuler.

"Saya sangat mendukung beberapa langkah diambil oleh

pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI (KBRI) dalam mengevakuasi WNI di Suriah," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS ini kepada awak media.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat II ini meng-himbau semua elemen bangsa mendo'akan serta mendukung langkah-langkah dan upaya pemerintah Indonesia untuk men-jamin keamanan dan kepastian keberadaan WNI yang saat ini tengah berada di Suriah dalam keadaan baik, aman dan selamat.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat mendo'a-kan dan mendukung langkah-langkah serta komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya memastikan keberadaan, kemandirian, dan keselamatan WNI di tengah krisis politik dan keamanan di Suriah saat ini," demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.

"Saya sangat mendukung beberapa langkah diambil oleh pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI (KBRI) dalam mengevakuasi WNI di Suriah,"

**Dr. H. AHMAD
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



image istimewa

Kejahatan Penyiraman Air Keras Marak,

Komisi III FPKS: Perketat Aturan Penjualan Air Keras!

Jakarta (20/12) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat menyampaikan bahwa kejahatan dengan menyalahgunakan air keras kian marak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, imbuhan Surahman, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus agar tindak kejahatan penyiraman air keras tidak kembali terjadi di Indonesia.

"Di Indonesia, pemakaian air keras untuk tindak kriminal meningkat sejak tahun 1970-

an. Bahkan pada tahun 1971 penyalahgunaan air keras pernah mencoreng wajah pendidikan di Indonesia, kasus saat itu air keras digunakan untuk menyerang mahasiswa baru saat masa orientasi mahasiswa di salah satu kampus negeri," kata legislator yang pernah bertugas di Komisi X DPR RI.

Surahman lanjut memaparkan beberapa kasus kejahatan penyiraman air keras yang telah terjadi di Indonesia, antara lain pada tahun 2017, kasus penyiraman air keras terjadi pada mantan penyidik KPK Novel Baswedan, kasus pelaku H yang menyiram air keras pada isteri dan dua anaknya karena cemburu, dan kasus pelaku L yang menyiram air keras hingga menewaskan korban D.

"Tahun 2019, kasus penyiraman air keras pada siswi SMP di NTT yang dilakukan oleh sepupunya dengan motif dendam karena cinta ditolak. Kemudian pada tahun 2024

kembali beberapa kasus terjadi berturut-turut, mulai dari kasus penyiraman air keras yang terjadi pada korban MAS di Cengkareng Jakarta Barat, kasus dua orang petugas dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya yang disiram air keras saat hendak membubarkan tawuran di Kembangan Jakarta Barat," papar Surahman.

Kini, lanjut Surahman, kembali terjadi lagi kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh pelaku AR terhadap korban perempuan berinisial F di Bekasi Utara dikarenakan cemburu.

Kasus kejahatan penyiraman air keras, kata Surahman, kerap kali dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang dekat korban dengan motif masalah pribadi seperti sakit hati, dendam, cemburu, dan lain-lain.

"Ada beberapa kemungkinan alasan pelaku memilih menggunakan air keras sebagai

BERIKUTNYA >>>

Kejahatan Penyiraman Air Keras Marak, Komisi III FPKS: Perketat Aturan Penjualan Air Keras!

« SEBELUMNYA

alat untuk menyakiti korban dikarenakan air keras mudah dan murah untuk didapatkan, tidak memerlukan keahlian khusus untuk menggunakannya, dianggap efektif oleh pelaku untuk mendukung misi kejahatannya untuk membuat kecacatan pada korban, dan memungkinkan pelaku untuk melarikan diri dari TKP,” ujar Surahman.

Surahman menyampaikan bahwa air keras adalah larutan asam kuat yang pekat dan memiliki beberapa jenis, di antaranya sering digunakan oleh masyarakat yakni asam klorida (HCl) yang biasa digunakan un-

tuk membersihkan logam sebelum disolder, menghilangkan karat, dan mengukur kadar asam basa. Kemudian, ada asam sulfat (H₂SO₄) yang biasa digunakan untuk menghidupkan aki kendaraan bermotor, memberikan kamar mandi, logam, dan cairan baterai. Serta Asam fosfat (H₃PO₄) yang biasa digunakan dalam pembersih logam, desinfektan, dan deterjen.

“Pelarangan terhadap penjualan air keras memang tidak bisa dilakukan dikarenakan keberadaan air keras seringkali dibutuhkan masyarakat. Air keras ibarat pedang bermata dua, di satu sisi memungkinkan manusia menggunakannya sebagai senyawa bermanfaat tapi disisi lain juga memungkinkan manusia menyalahgunakan untuk ancaman dan menyerang orang lain. Namun, pencegahan penyalahgunaan air keras untuk tindak kejahatan bisa dilakukan, yakni pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan pengaturan terkait jual beli air keras,” imbuh Surahman.

Surahman mengatakan selain melakukan penegakan hukum atas tindak kejahatan

penyiraman air keras, diperlukan pendekatan lain yang harus dilakukan yakni pengaturan penjualan dan pembelian bahan kimia berbahaya, karena salah satu sebab air keras digunakan pelaku untuk menyerang dan menyakiti korban dikarenakan air keras mudah didapatkan dengan harga yang murah, bahkan dapat saat ini sangat mudah dapat dibeli di toko online.

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebaiknya mengatur kebijakan yang lebih ketat terkait jual beli air keras, seperti membatasi tempat penjualan, memerlukan izin khusus untuk membelinya atau penjual bisa meminta identitas pembeli dan membatasi jumlah yang dibeli,” pungkasnya.

Pemerintah dan pemerintah daerah, ungkap Surahman, juga perlu memperbanyak CCTV sehingga mempersulit masyarakat untuk melakukan kejahatan penyiraman air keras dan tindak kejahatan lainnya. Disamping itu, diperlukan sosialisasi terkait bahaya dan pidana penyalahgunaan air keras dan edukasi terkait pertolongan pertama jika terkena air keras.

“Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu lebih berupaya dalam melakukan penanaman dan penguatan nilai-nilai agama dan moral agar masyarakat terhindar dari sikap pendendam, dengki, dan keinginan menyakiti orang lain,” saran Surahman.



“Pelarangan terhadap penjualan air keras memang tidak bisa dilakukan dikarenakan keberadaan air keras seringkali dibutuhkan masyarakat. Air keras ibarat pedang bermata dua, di satu sisi memungkinkan manusia menggunakannya sebagai senyawa bermanfaat tapi disisi lain juga memungkinkan manusia menyalahgunakan untuk mengancam dan menyerang orang lain.

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Komisi III DPR RI



Menko Hukum-HAM Tidak Sensitif Wacanakan Pelaku Tipikor Cukup dengan Restorative Justice

Jakarta (20/12) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil menyoroti pernyataan dari Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, bahwa ada upaya untuk mengubah pendekatan penegakan hukum korupsi dari retributif ke restoratif.

Menurut Nasir, sebaiknya Menko Yusril perlu lebih hati-hati bicara soal pendekatan restoratif tersebut terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hal itu karena menyangkut dengan sensitivitas publik. "Karena kita tahu indeks persepsi korupsi kita turun. Kemudian korupsi juga masih menjadi musuh bangsa karena masuk dalam kategori extra ordinary crime karena melibatkan kejahatan kerah putih. Korupsi politik. Korupsi

judisial," ujar Nasir di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Sehingga, menurut Politisi Fraksi PKS ini, daripada menimbulkan kegaduhan, lebih baik wacana tersebut dihentikan. Sebaliknya, sebelum melangkah ke sana, Nasir menilai banyak hal yang harus diperbaiki, khususnya terkait moralitas pejabat terkait.

"Sebaiknya memang jangan mengumbar hal-hal yang kontraproduktif dalam hal upaya Pak Presiden terkait (pemberantasan) tipikor itu."

"Karena di banyak negara korupsi itu bahkan dihukum mati. China, misalnya. Kita sayang dengan Pak Prabowo. Jadi, seolah-olah (dengan adanya wacana) ini Pak Prabowo itu dinilai memandang memandang remeh kejahatan tindak pidana korupsi. Padahal, beliau sangat strict terkait kasus korupsi itu. Sebaiknya memang jangan mengumbar hal-hal yang kontraproduktif dalam hal upaya Pak Presiden terkait (pemberantasan) tipikor itu," pungkas Doktor Ilusan Unissula Semarang ini.

Diketahui, dalam pendekatan restoratif, pelaku tindak pidana korupsi tidak harus dipenjarakan. Mereka cukup mengembalikan dana. Selama ini pendekatan restoratif digunakan dalam tindak pidana ringan (tipiring) seperti perkelahian tanpa senjata, perusakan properti, atau pidana ringan yang melibatkan anak dan perempuan.

Sebelumnya, rencana perubahan ini diungkapkan Menko Yusril di acara diskusi bertema Agenda Pemberantasan Korupsi Kabinet Merah Putih yang digelar secara virtual oleh Forum Insan Cita, pada Minggu (15/12/2024) malam.

Menteri Yusril mengatakan Indonesia masih memakai pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) era kolonial Belanda dalam paradigma pemberantasan korupsi.



"Sebaiknya memang jangan mengumbar hal-hal yang kontraproduktif dalam hal upaya Pak Presiden terkait (pemberantasan) tipikor itu. Karena di banyak negara korupsi itu bahkan dihukum mati."

H.M. NASIR DJAMIL, M.Si
Anggota Komisi III DPR RI

Padahal, lanjut dia, KUHP telah diperbarui dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang membuka ruang rehabilitasi dalam penegakan hukum pidana. Hanya saja, ruang tersebut belum diakomodir dalam berbagai aturan pemberantasan korupsi.

Untuk itu, pemerintah telah mengubahnya dengan tak hanya menekankan pemenjaraan yang sifatnya balas dendam seperti di KUHP warisan kolonial Belanda, tapi lebih menekankan keadilan kolektif, restoratif dan rehabilitatif.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif



Memperingati

Hari Bela Negara

19 Desember 2024

Peringati Bela Negara, pengingat bagi kita agar siap siaga berbakti untuk panggilan Negeri, warisan para pahlawan Umat dan Bangsa tercinta ini. Agar NKRI selalu terjaga marwah dan daulatannya.

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

Ketua Fraksi PKS DPR RI





Aleg PKS: Urban Farming Salah Satu Solusi Strategis Jawab Tantangan Ketahanan Pangan di Perkotaan

Surakarta (23/12) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Al Masyhari menyatakan bahwa urban farming merupakan salah satu solusi strategis untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, terutama di wilayah perkotaan.

Hal ini disampaikan Abdul Kharis dalam kunjungan spesifiknya ke Komunitas Urban Farming di Kampung Batik Laweyan, Kota Solo.

"Kita menghadapi berbagai tantangan terkait ketahanan pangan, khususnya di perkotaan yang terus berkembang. Urban farming menawarkan solusi yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan pangan sehat dan bergizi," ungkap Abdul Kharis di sela-sela kunjungan.

Abdul Kharis memulai kunjungan dari Rumah Bibit di RW 5 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan.

Di lokasi tersebut, ia mendapatkan penjelasan mengenai proses pembibitan, teknik penanaman, hingga penerapan sistem aquaponik yang inovatif.

Selain itu, Abdul Kharis juga meninjau vertical garden yang dirawat oleh komunitas setempat. Inisiatif ini menunjukkan pemanfaatan ruang sempit secara produktif di kawasan perkotaan,

sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih asri.

"Kami di Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mendorong program-program yang mendukung urban farming. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan masyarakat perkotaan memiliki akses terhadap pangan yang sehat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih baik," tambahnya.

Abdul Kharis juga menyampaikan apresiasinya

kepada komunitas di Kampung Batik Laweyan yang telah menginspirasi banyak pihak melalui inisiatif urban farming. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh dan diadopsi oleh masyarakat perkotaan lainnya di seluruh Indonesia.

"Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Melalui urban farming, kita tidak hanya menjawab tantangan pangan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas di perkotaan," pungkasnya.

Melalui kunjungan ini, Abdul Kharis berharap sinergi antar pihak dapat segera terwujud, sehingga urban farming dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Kami di Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mendorong program-program yang mendukung urban farming. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan masyarakat perkotaan memiliki akses terhadap pangan yang sehat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih baik,

**Dr. H. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI



Aleg PKS Apresiasi Langkah Berani Kementan Soal Pemberhentian Sementara Impor Kambing dan Domba

Jakarta (16/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tata Kelola peternakan yang menyebabkan terjadinya peningkatan impor kambing dan domba dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi lonjakan impor yang signifikan selama periode 2019 hingga 2023.

"Pada 2019, impor kambing dan domba tercatat sebesar 2,42 ribu ton atau setara dengan USD 15,10 juta. Namun, pada Mei 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat transaksi impor untuk komoditas yang sama mencapai USD 129,93 juta. Lonjakan ini sangat mengkhawatirkan," ujar Slamet.

Produksi Lokal Masih Cuk-up untuk Memenuhi Permintaan Berdasarkan data BPS,

produksi daging domba di Indonesia pada 2023 mencapai 52,99 ribu ton, meningkat 1,6% dibandingkan 2022 yang sebesar 52,16 ribu ton. Salah satu daerah penghasil terbesar adalah Jawa Barat, dengan produksi mencapai 33,49 ribu ton pada 2022, meningkat dari 31,86 ribu ton pada 2021.

"Data ini menunjukkan bahwa peternak lokal sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan pasar. Namun, derasnya impor justru mengancam keberlanjutan usaha mereka," tegas drh. Slamet.

Menurutnya, kebijakan impor yang tidak terkendali berpotensi merugikan peternak lokal yang selama ini berperan besar dalam penyediaan daging domba dan kambing.

Ia mengkritisi kebijakan impor yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri.

Apresiasi Terhadap Respons Menteri Pertanian

Politisi senior PKS ini mengapresiasi langkah cepat dan berani kementerian pertanian, yang merespons keluhan peternak dengan memberhentikan sementara rekomendasi impor. Langkah ini dinilai sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan sektor peternakan nasional.

"Saya mengapresiasi Menteri Pertanian, wakil menteri dan beserta jajarannya atas keputusan strategis ini. Langkah tersebut memberikan ruang bagi peternak lokal untuk tetap bersaing dan mempertahankan usaha mereka," ungkapnya.

Permintaan Pengaturan Kebijakan Impor

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini meminta Kementerian Pertanian untuk mengatur kembali kebijakan impor ternak, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dengan keberlangsungan produksi lokal.

"Kebijakan impor seharusnya



"Kebijakan impor seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi bumerang yang melemahkan sektor peternakan kita,"

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

nya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi bumerang yang melemahkan sektor peternakan kita," pungkash Slamet.

Ia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemandirian peternakan nasional.



image istimewa

Anggota FPKS: Kenaikan PPN 12 % Bisa Hambat Swasembada Pangan

Mataram (19/12) --- Anggota Komisi IV DPR RI Dapil NTB 1 Johan Rosihan menyampaikan keprihatinan terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, termasuk pemberlakuannya pada produk pertanian tertentu.

Kebijakan ini dinilai berpotensi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap sektor pertanian, swasembada pangan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil.

Johan menyatakan bahwa kenaikan PPN dapat membebani petani melalui peningkatan biaya produksi, seperti pupuk, benih, dan alat pertanian.

"Selain itu, kebijakan ini juga berisiko, yang pertama Meningkatkan Harga Produk Pangan. Harga jual produk pertanian berpotensi naik, sehingga menurunkan daya beli masyarakat," sebut Johan.

Kedua, imbuh Johan, Mengurangi Daya Saing Produk Lokal. Produk lokal bisa kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, bertentangan dengan upaya melindungi petani dalam negeri.

"Ketiga yaitu menghambat Swasembada Pangan. Ketergantungan pada impor bisa meningkat jika petani kehilangan insentif untuk meningkatkan produktivitas," terang Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Keempat, lanjut Johan, mengancam Ketahanan Pangan. Harga pangan yang lebih tinggi dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang terjangkau.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan penundaan implementasinya.

Langkah ini, imbuhnya, diperlukan agar tidak menghambat sektor pertanian yang menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

"Kenaikan PPN pada produk pertanian harus dikaji lebih dalam karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh masyarakat luas. Ketahanan pangan adalah prioritas, dan kami tidak ingin kebijakan ini justru menjadi penghambat bagi pencapaian swasembada pangan," ujar Johan.

BERIKUTNYA >>>

Anggota FPKS : Kenaikan PPN 12% Bisa Hambat Swasembada Pangan

« SEBELUMNYA

Johan juga mengusulkan sejumlah langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak kebijakan ini, antara lain, Pertama sebut Johan, Pengecualian Barang Strategis. Memperluas daftar produk pertanian strategis yang dikecualikan dari PPN, seperti sayur, buah, dan produk pangan pokok lainnya.

"Kedua, Peningkatan Subsidi. Menambah subsidi untuk pupuk, benih, dan input produksi lainnya guna mengimbangi kenaikan biaya yang mungkin timbul," ujarnya.



Johan menambahkan, yang ketiga Insentif untuk Petani Kecil. Memberikan insentif pajak atau dukungan finansial untuk petani kecil agar tetap termotivasi meningkatkan produktivitas.

"Keempat Dialog dengan Stakeholder. Melibatkan petani, asosiasi, akademisi, dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan yang adil dan tidak membebani sektor pertanian," tegas Anggota DPR RI dari Dapil NTB II ini.

Sebagai Wakil Rakyat, Politisi asal Sumbawa ini berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang pro-petani dan pro-pangan.

"Kami akan terus mendorong pemerintah agar mengambil langkah yang bijak dan mendukung visi bersama untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Kami siap berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Jangan sampai kebijakan ini justru melemahkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional," tutup Johan yang saat ini sedang banyak ketemu stakeholder pertanian dalam masa Resesnya.



"Kami akan terus mendorong pemerintah agar mengambil langkah yang bijak dan mendukung visi bersama untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Kami siap berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Jangan sampai kebijakan ini justru melemahkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional,"

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IX DPR RI



Aleg PKS : Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian Indonesia Timur Harus Jadi Prioritas Strategi Nasional

Merauke (23/12) --- Kunjungan reses Komisi IV DPR RI ke Merauke pada 7 Desember 2024 menjadi momen penting dalam memastikan keberhasilan program lumbung pangan nasional.

Dalam kunjungan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri bersama 13 anggota Komisi IV DPR RI, langkah konkret diambil untuk mendukung visi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa pengembangan kawasan sentra pertanian di Indonesia Timur, khususnya Papua Selatan, harus diprioritaskan sebagai strategi nasional.

"Papua Selatan memiliki potensi luar biasa dengan lahan subur dan iklim tropis yang mendukung pertanian sepanjang tahun. Ini peluang besar untuk menjadikan wilayah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional," ujar Saadiah.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah meninjau progres program cetak sawah satu juta hektar, yang menjadi prioritas nasional. Desa Telaga Sari di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, menjadi lokasi kunjungan, di mana rombongan menyaksikan langsung panen padi menggunakan alat modern.

"Kami sempat mencoba alat pemanen ini dan melihat bagaimana teknologi dapat meringankan pekerjaan petani," kata Saadiah.

Kabupaten Merauke, dengan luas 46.791,63 km², memiliki kawasan strategis seperti Wanam, yang direncanakan menjadi pusat pengembangan sawah baru.

Wilayah ini memiliki topografi dataran rendah, curah hujan tinggi, serta akses sumber air alami dari sungai besar seperti Sungai Maro, yang sangat ideal untuk pertanian skala besar.

"Wanam adalah wujud visi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan melibatkan masyarakat lokal, swasta, dan pemerintah, kita menciptakan model pertanian yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Anggota DPR RI Dapil Maluku ini.

Proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Jhonlin Group, yang telah membawa ribuan alat berat dan tenaga ahli untuk mengolah lahan di Papua.

BERIKUTNYA >>>

Aleg PKS : Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian Indonesia Timur Harus Jadi Prioritas Strategi Nasional

« SEBELUMNYA

Selain itu, proyek ini menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan keterampilan petani, dan memastikan konsultasi dengan masyarakat adat agar nilai-nilai lokal tetap terjaga.

“Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari luasnya sawah yang tercetak, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Papua Selatan. Kita ingin melihat masyarakat lokal menjadi bagian dari transformasi ini,” ungkap Saadiah.

Sebagai bagian dari upaya strategis nasional, cetak sawah di Merauke bukan sekadar proyek agrikultur, melainkan langkah maju untuk mempersiapkan

Indonesia menghadapi tantangan ketahanan pangan global.

“Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah timur Indonesia,” pungkas Saadiah.

Dengan potensi alam yang luar biasa dan dukungan berbagai pihak, Papua Selatan berpeluang besar menjadi sentra pertanian unggulan yang menopang kemandirian pangan Indonesia.

“Semangat kebersamaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kawasan timur Indonesia,” tutup Saadiah.



image istimewa



“Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari luasnya sawah yang tercetak, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Papua Selatan. Kita ingin melihat masyarakat lokal menjadi bagian dari transformasi ini,”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI



Aleg PKS, Yanuar Arif Berhasil Perjuangkan Aspirasi Aktifkan Stasiun Kebasen

PKS TV DPR RI | FPKS DPR RI | fraksipksdprri | @fpksdprri | @fpksdprri

#1

Infografis FRAKSI PKS DPR RI



6 November 2024

Yanuar Arif Wibowo menyampaikan aspirasi untuk mengaktifkan Stasiun Kebasen kepada Menteri Perhubungan Gudy Purwagandono dalam Rapat Kerja DPR RI.

Agenda ini membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai November 2024 dan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapssem) II BPK RI Tahun 2023.



6 November 2024

Stasiun Kebasen itu antara Purwokerto ke arah Kroya. Jadi warga di sekitar sana, warga Kawato, Kebasen, Sampang, dan Paritkroja, itu merasa terlalu jauh kalau harus ke Purwokerto ataupun ke Kroya.

Jadi tolong ini dikaji pak, apakah memungkinkan kemudian ada pemberhentian kereta angkut penumpang karena selama ini hanya untuk tansi di situ.

H. Yanuar Arif
Wibowo, S.H.

Anggota Komisi V DPR RI
dari Fraksi PKS



18 November 2024

Yanuar Arif Wibowo melakukan dialog dengan unsur masyarakat terkait urgensi pengaktifan Stasiun Kebasen.

Yanuar Arif juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi Stasiun Kebasen untuk melihat kondisi dan kesiapan fasilitas pendukung.



20 November 2024

Yanuar Arif Wibowo bersama Dirjen Perkeretaapian, Rini Wastu, secara resmi menyampaikan aspirasi masyarakat Kebasen dan sekitarnya untuk mengaktifkan Stasiun Kebasen sebagai titik pemberhentian naik-turun penumpang kereta api.

“Semoga Stasiun Kebasen bisa segera diaktifkan. **Dukung dan doakan perjuangan ini ya, Insya Allah** buat warga Kebasen dan sekitarnya!”

H. Yanuar Arif Wibowo, S.H.

Anggota Komisi V DPR RI
dari Fraksi PKS



18 Desember 2024



18 Desember 2024

Berikut advokasi yang dilakukan oleh Yanuar Arif Wibowo, Stasiun Kebasen resmi melakukan uji coba (soft launching) penjualan tiket untuk naik-turun penumpang kereta api.



23 Desember 2024

Grand Launching Stasiun Kebasen sebagai stasiun resmi untuk naik-turun penumpang kereta api. Moment ini menandai keberhasilan perjuangan aspirasi warga yang diadvokasi oleh Yanuar Arif Wibowo.





image istimewa

Aleg PKS Minta Pemerintah Lakukan Audit Konstruksi Terkait Jalan Amblas di JLS Malang

Jakarta (12/12) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, meminta pemerintah untuk segera melakukan audit konstruksi menyeluruh terhadap proyek Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) Kelok 9 di Kabupaten Malang.

Hal ini menyusul kejadian amblesnya badan jalan sepanjang 50 meter dengan kedalaman hingga 2 meter setelah hujan deras pada Selasa (10/12/2024) hingga Rabu (11/12/2024).

"Dari data awal, bisa jadi terdapat kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan proyek. Jalan yang baru dibangun dan jarang dilalui pengguna tidak semestinya ambles hanya karena hujan deras," ujar Reni dalam keterangannya, Kamis (12/12).

Reni menjelaskan bahwa amblesnya jalan kemungkinan disebabkan oleh analisis geoteknik yang kurang memadai.

"Analisis yang tidak komprehensif bisa membuat potensi aliran tanah atau ketidakstabilan area tidak terpetakan dengan baik. Akibatnya, ketika hujan deras terjadi, jalan amblas karena faktor tanah yang tidak stabil," jelasnya.

Selain itu, Reni menambakan bahwa kesalahan desain seperti sistem drainase yang buruk atau ketiadaan dinding penahan tanah juga ber-

kontribusi pada kerusakan ini.

"Jika perencanaan sebenarnya telah memenuhi standar tetapi tidak diikuti oleh pelaksanaan proyek, maka indikasi kesalahan dalam pelaksanaan juga harus dievaluasi," ujarnya.

Lebih lanjut Reni meminta pemerintah untuk segera melakukan audit konstruksi. Audit ini diperlukan untuk memastikan seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek dilakukan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, dan regulasi yang berlaku.

"Proses audit akan mengungkap apakah masalah ini berasal dari perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak sesuai desain, atau pengawasan yang lemah," kata Reni.

Reni Astuti juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem drainase pada proyek tersebut untuk memastikan aliran air efektif sehingga tidak merusak struktur jalan.

"Selain itu, pemantauan berkala di daerah rawan longsor harus dilakukan untuk mende-

BERIKUTNYA »»

Aleg PKS Minta Pemerintah Lakukan Audit Konstruksi Terkait Jalan Amblas di JLS Malang

« SEBELUMNYA

teks potensi masalah sejak dini,” tambahnya.

JLS Kelok 9 di kawasan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, merupakan ruas jalan yang belum ramai dilalui karena bukan akses utama dan belum tersambung dengan jalur ke Kabupaten Blitar.

Dari 50,86 kilometer ruas JLS di wilayah Malang, masih ada 3,94 kilometer yang dalam proses konstruksi dan 43,30 kilometer menunggu pembebasan lahan.



Reni menekankan bahwa perencanaan jalan di area dengan curah hujan tinggi seperti Malang harus memperhatikan mitigasi risiko lingkungan.

“Faktor-faktor seperti kondisi tanah, potensi longsor, dan curah hujan tinggi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan infrastruktur,” katanya.

Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, Reni juga mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengawasan proyek infrastruktur di masa mendatang.

“Penggunaan material berkualitas rendah, pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau pengawasan yang kurang ketat tidak boleh lagi terjadi. Proyek-proyek seperti JLS ini memiliki dampak besar terhadap konektivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan audit konstruksi yang komprehensif dan tindakan perbaikan yang segera, Reni berharap kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.

“Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar aman, andal, dan sesuai standar,” pungkasnya.



Penggunaan material berkualitas rendah, pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau pengawasan yang kurang ketat tidak boleh lagi terjadi. Proyek-proyek seperti JLS ini memiliki dampak besar terhadap konektivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat,”

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi V DPR RI



Masa Reses, Abdul Hadi Tinjau Proyek Infrastruktur di NTB

Lombok Barat (12/12) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah proyek infrastruktur di wilayah NTB yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek yang ditinjau termasuk Bendungan Meninting di Lombok Barat dan pembangunan jembatan di jalur Dasan Cermen, Kota Mataram, menuju Rumak, Lombok Barat.

Kunjungan ini didampingi oleh Kepala dan jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dalam tinjauannya, Abdul Hadi menyampaikan bahwa progres pembangunan Bendungan Meninting sudah mencapai lebih dari 80%.

Ia optimis bahwa proyek ini dapat diresmikan pada Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Abdul Hadi menekankan pentingnya bendungan ini dalam mendukung ketersediaan

air yang berkelanjutan di Pulau Lombok.

"Dengan suplai air dari Bendungan Meninting, petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali dalam setahun, kini dapat meningkatkan intensitas tanam menjadi dua hingga tiga kali setahun. Bendungan ini juga akan menjadi solusi untuk mengatasi kekeringan di Pulau Lombok," ungkap Abdul Hadi, Selasa, (10/12/2024).

Bendungan Meninting tidak hanya memberikan manfaat bagi wilayah Lombok Barat, tetapi juga akan mendukung suplai air ke daerah Lombok Selatan, yang memiliki potensi pertanian yang besar.

Abdul Hadi berharap

proyek ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih banyak pembangunan infrastruktur di NTB melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi V, Abdul Hadi telah menyampaikan berbagai aspirasi infrastruktur untuk NTB kepada Kementerian PU. Beberapa usulan tersebut antara lain yang telah disampaikan dalam rapat Komisi V dengan Kementerian PU diantaranya, Pembangunan Jalan Lingkar Utara sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah tengah Pulau Lombok

"Kami juga menyampaikan untuk diperbanyaknya Pembangunan Inpres Jalan, hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, kami mendorong percepatan penyelesaian beberapa proyek inpres jalan yang belum selesai di daerah NTB dan menambah usulan inpres jalan baru," jelas Politisi PKS asal Lombok ini.

Selain itu Abdul Hadi juga mengusulkan Pembangunan Bendungan di Lombok Utara dan Lombok Timur bagian utara (Kecamatan Suela dan Sambelia).

"Wilayah ini memiliki banyak air yang terbuang langsung ke laut. Jika bendungan dibangun, air tersebut dapat dimanfaatkan untuk irigasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu jika infrastruktur ini terwujud, NTB memiliki peluang besar untuk



"Kami juga menyampaikan untuk diperbanyaknya Pembangunan Inpres Jalan, hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, kami mendorong percepatan penyelesaian beberapa proyek inpres jalan yang belum selesai di daerah NTB dan menambah usulan inpres jalan baru

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Komisi V DPR RI

menjadi lumbung pangan nasional, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengaktifkan kembali lumbung pangan dari tingkat nasional hingga desa," ujar Abdul Hadi.

Abdul Hadi berharap dukungan APBN disektor

infrastruktur untuk NTB dapat terus meningkat di masa mendatang, sehingga pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjadi motor penggerak utama kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Peresmian Stasiun Kebasen Banyumas, Anggota DPR RI Yanuar Arif: Jawaban Aspirasi Masyarakat

Purwokerto (23/12) — Stasiun Kebasen resmi diaktifkan sebagai stasiun naik turun penumpang pada Senin, 23 Desember 2024.

Peresmian ini dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar, Ketua DPRD Banyumas, PJ Bupati Banyumas dan VP Daop 5 Purwokerto.

Anggota Komisi V DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mengungkapkan bahwa peresmian ini merupakan jawaban atas aspirasi lama masyarakat Kebasen dan sekitarnya.

Yanuar menambahkan, selama ini warga harus pergi ke Stasiun Purwokerto atau Kroya untuk naik kereta api, yang memakan waktu lebih lama.

"Alhamdulillah, stasiun ini sudah direhabilitasi sehingga layak untuk dijadikan destinasi pemberhentian angkutan penumpang. Pemerintah mendengarkan rakyatnya, dan setelah dikaji secara teknis oleh Dirjen Perkeretaapian, akhirnya aspirasi ini bisa diwujudkan," kata Yanuar.

Ia juga menekankan bahwa pengaktifan Stasiun Kebasen diharapkan dapat meningkatkan layanan transportasi, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Potensi Ekonomi dan

Wisata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, menjelaskan bahwa sejak uji coba pada 18 Desember 2024, stasiun ini sudah mulai melayani penumpang, meskipun mayoritas adalah penumpang yang turun.

"Karena masa liburan Natal dan Tahun Baru, banyak penumpang sudah membeli tiket untuk naik dari stasiun lain seperti Purwokerto dan Kroya," kata Arif.

Meski demikian, ia optimis jika Stasiun Kebasen akan men-

jadi lebih ramai dan dibutuhkan masyarakat.

Arif juga menambahkan bahwa lokasi strategis Stasiun Kebasen dekat dengan destinasi wisata dapat menarik wisatawan untuk turun langsung di Kebasen tanpa harus ke stasiun utama. Hal ini berpotensi meningkatkan kunjungan wisata dan mendukung perekonomian lokal.

Ke depannya, ada peluang untuk menambah jadwal pemberhentian kereta di stasiun ini jika permintaannya terus meningkat. Dengan demikian, Stasiun Kebasen tidak hanya menjadi fasilitas transportasi, tetapi juga bagian dari solusi pemerataan akses dan pengembangan ekonomi daerah.

Potensi Ekonomi dan Wisata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, menjelaskan bahwa sejak uji coba pada 18 Desember 2024, stasiun ini sudah mulai melayani penumpang, meskipun mayoritas adalah penumpang yang turun.

Karena masa liburan Natal dan Tahun Baru, banyak penumpang sudah membeli tiket untuk naik dari stasiun lain seperti Purwokerto dan Kroya,"

**H. YANUAR ARIF
WIBOWO, S.H.**

Anggota Komisi V DPR RI



image istimewa

Komisi VII FPKS: Kemudahan Izin Event Dorong Perputaran Ekonomi Masyarakat

Jakarta (12/12) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Izzuddin Al-Qassam Kasuba, mendukung kebijakan penyederhanaan perizinan event untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Qassam menyambut baik rencana Pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan penyelenggaraan acara nasional maupun internasional.

la menilai kebijakan ini

kebijakan ini penting untuk meningkatkan jumlah event dan mendorong perputaran ekonomi di masyarakat. Penyederhanaan perizinan event adalah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini akan membuka lebih banyak peluang bagi penyelenggara acara dan pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara,”

IZZUDDIN ALQASSAM KASUBA

Anggota Komisi VII DPR RI

penting untuk meningkatkan jumlah event dan mendorong perputaran ekonomi di masyarakat.

“Penyederhanaan perizinan event adalah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini akan membuka lebih banyak peluang bagi penyelenggara acara dan pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara,” ujar Qassam.

la menekankan bahwa regulasi yang sederhana akan memangkas biaya dan hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala.

“Kami mendukung penuh agar regulasi ini segera

diterapkan. Proses izin yang mudah akan membuat lebih banyak event digelar, sehingga dampaknya terasa langsung pada ekonomi masyarakat,” jelas pemuda asal Maluku Utara tersebut.

Qassam juga mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dengan regulasi yang jelas dan terukur.

“Regulasi harus memastikan transparansi dan efisiensi, sehingga penyelenggara acara dapat fokus menghasilkan event berkualitas tanpa terbebani birokrasi rumit,” tegasnya.



image istimewa

Fikri Faqih Minta BNPB dan BPBD Siaga 24 Jam Tanggap Bencana

Tegal (16/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih meminta garda penanggulangan dan penanganan bencana di Indonesia, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI

untuk siaga penuh 24 jam untuk tanggap darurat bencana.

Apalagi, kata pria yang akrab disapa Fikri ini, hari-hari kedepan cuaca ekstrem di Indonesia diprediksi masih terjadi.

“BNPB, BPBD harus siaga 24 jam, cuaca yang ekstrem

saat ini mengharuskan seluruh jajaran di daerah juga harus siaga tanggap darurat,” kata Fikri, dalam keterangannya, Ahad (15/12/2024) di Tegal.

Sebagai informasi, kejadian bencana alam meningkat dalam kurun waktu beberapa hari belakangan. Salah satunya adalah kejadian Longsor yang terjadi di Kecamatan Salem, Brebes, Sabtu (14/12/2024) yang membuat sempat membuat dua desa terisolir.

Akses jalan menuju kedua desa itu lumpuh total akibat tertutup material longsor di 11 titik, memaksa 1.200 jiwa terpaksa tanpa akses keluar-masuk.

Parahnya, pasokan air ber-

sih putus, memaksa sebagian warga mengungsi ke gedung sekolah.

Atas kondisi kedaruratan tersebut, Fikri yang juga legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta penanganan pasca bencana harus dilakukan secepatnya.

“BNPB bekerja sama dengan BPBD serta Pemerintah daerah harus secepatnya memberikan bantuan penanganan, karena kalau soal sandang, papan, dan pang itu tidak bisa ditunda, apalagi bencana, sandang juga seperti itu, secepatnya diberikan kepada korban bencana,” pungkasnya.

**Dr. H. ABDUL
FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Ketua Komisi VIII DPR RI



image istimewa

Politisi PKS Dukung Program 'Quick Win' Prabowo untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta (23/12) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan APBN 2025 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Saya mencatat terdapat beberapa program yang menjadi 'Quick Win' dari Pemerintahan Prabowo. Diantaranya adalah: Pertama, Pemberantasan korupsi. Kita ketahui korupsi adalah kejahatan yang sudah sangat meresahkan dan mengganggu jalannya pembangunan. Kita tunggu realisasinya," katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta (23/12).

Selanjutnya Anis menyebut program berikutnya yaitu pengentasan kemiskinan seperti disampaikan presiden dalam komitmennya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok yang paling rentan, saat ini yang sedang berjalan persiapan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Ketiga, swasembada pangan. Presiden mengingatkan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global yang bisa mengancam pasokan pangan. Harus ada tekad yang kuat untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan bahkan menargetkan Indonesia untuk

menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya.

"Keempat, Swasembada Energi. Ketergantungan pada impor energi menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dalam ketidakpastian geopolitik global," papar Anis.

"Oleh karena itu, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri seperti geotermal, tenaga air, dan bio energy. Kelima, Distribusi Subsidi yang tepat sasaran. Presiden berkomitmen untuk menggunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan. Kita mesti kawal dan lihat apakah janji-janji Presiden tersebut akan segera direalisasikan dalam anggaran APBN 2025," ungkapnya.

Akan tetapi Anggota DPR RI asal Jakarta ini berharap tingkat kebocoran APBN bisa semakin berkurang.

"Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya. Tapi

BERIKUTNYA >>>

Politisi PKS Dukung Program 'Quick Win' Prabowo untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

« SEBELUMNYA

potensi kebocoran APBN masih tetap ada, baik yang terdapat di pos pendapatan negara terutama pajak, maupun yang terdapat dalam pos belanja negara," ujarnya.

Politisi perempuan PKS ini menyebut indikator masih tingginya angka kebocoran bisa dilihat dalam angka ICOR sebesar 6,5. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi semakin efisien juga untuk menghasilkan output tertentu. Angka ICOR di negara-negara Asean lainnya berkisar antara 4,0 – 5,0.

"Artinya investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Selain itu, bisa terlihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir," paparnya.

Legislator PKS ini memandang pos belanja program prioritas Pemerintah sudah diakomodasi dalam APBN 2025.

"Tentunya kita berkomitmen untuk membantu mensukseskan program 'Quick Win' Pemerintahan baru tersebut, karena berhubungan erat dengan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mencatat, antara lain: Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu

menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan," katanya.

Selanjutnya Anis menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk 'screening' penyakit katastropik.

"Ketiga, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah. Peningkatan Rumah Sakit (RS) type D menjadi RS type C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya. Keempat, Program Renovasi Sekolah, akan mencakup renovasi ruang kelas, mebel, dan MCK di seluruh Indonesia. Harapannya akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah," katanya.

Menurut Anggota DPR dapil Jakarta I ini berikutnya yaitu Sekolah Unggulan Terintegrasi. Program ini untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi. Program ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM anak Indonesia di daerah.

"Keenam, Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa. Program ini dengan melakukan intensifikasi 80.000 hektar area pertanian dan ekstensifikasi atau cetak sawah sebanyak 150.000 hektar. Ini akan membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional," ungkapnya.



"Tentunya kita berkomitmen untuk membantu mensukseskan program 'Quick Win' Pemerintahan baru tersebut, karena berhubungan erat dengan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif

*Selamat
Milad Ke-107*



Persatuan Umat Islam (PUI)

21 Desember
1917 - 2024

*Membangun kemandirian
Memajukan Bangsa*

Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI

Anggota FPKS Dorong Pemerintah Dukung UMKM Beralih ke Energi Hijau

Salatiga (13/12) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyerukan Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beralih ke energi hijau.

Pernyataan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia menyumbang hingga 216 juta ton emisi karbon dioksida (CO₂) per tahun, hampir setara dengan emisi sektor industri nasional yang mencapai 238,1 juta ton CO₂.

"UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi kontribusinya terhadap emisi karbon juga sangat signifikan. Kita harus memastikan bahwa transisi energi hijau dapat dilakukan secara inklusif dengan memberikan dukungan kepada UMKM," ujar Muh Haris, Rabu (13/12).

Sebagian besar emisi dari

UMKM, sekitar 95%, berasal dari pembakaran energi fosil, sedangkan sisanya disebabkan oleh pembakaran sampah. Sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa menjadi kontributor utama emisi ini. Data dari Institute for Essential Services Re-form (IESR) juga menunjukkan bahwa provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat memiliki tingkat emisi UMKM tertinggi.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I ini menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam beralih ke energi hijau adalah keterba-

atasan akses terhadap teknologi rendah karbon dan pendanaan untuk investasi energi terbarukan.

"Ini bukan hanya tentang mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, tetapi juga memastikan efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang lebih baik," tegasnya.

Untuk mendukung UMKM dalam transisi ini, Muh Haris mendorong pemerintah untuk menyediakan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya atau peralatan hemat energi. Selain itu, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur energi hijau yang memperluas akses energi terbarukan, khususnya di wilayah dengan konsentrasi UMKM yang tinggi. Edukasi dan pelatihan juga menjadi langkah penting untuk membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan tentang manajemen energi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan. Tak kalah penting, pemerintah harus menyediakan skema pendanaan mikro yang fokus pada proyek ramah lingkungan bagi UMKM, bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan.

Muh Haris juga mengajak sektor swasta untuk turut mendukung transisi energi hijau di kalangan UMKM.

"Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk



"UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi kontribusinya terhadap emisi karbon juga sangat signifikan. Kita harus memastikan bahwa transisi energi hijau dapat dilakukan secara inklusif dengan memberikan dukungan kepada UMKM,"

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

menciptakan ekosistem bisnis yang ramah lingkungan. Ini adalah tanggung jawab bersama," tuturnya.

Melalui langkah-langkah ini, Muh Haris optimis bahwa UMKM dapat menjadi agen perubahan dalam mencapai

target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060.

"Ini bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga tentang meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global," pungkasnya.



image istimewa

Politisi PKS Dorong Pemerintah Selesaikan Berbagai Isu Strategis Migas Demi Tarik Investasi Besar

Jakarta (21/12) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menekankan pentingnya pemerintah segera menyelesaikan sejumlah persoalan strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.

Politisi PKS ini menyatakan bahwa berbagai hambatan yang ada di sektor ini harus diatasi demi memanfaatkan potensi besar migas nasional secara optimal.

Pada rapat Komisi XII DPR RI bersama SKK Migas yang digelar 18 November 2024, Nevi mengungkapkan sejumlah permasalahan yang menghambat kemajuan sektor migas.

Diantaranya adalah perlunya perbaikan iklim investasi hulu migas melalui pemberian insentif berupa pembebasan pajak tidak langsung, proses persetujuan lingkungan seperti UKL/UPL dan AMDAL yang memakan waktu hingga 24 bulan, serta perizinan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menghambat operasional migas meskipun tanah telah dibebaskan.

Selain itu, Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan terhadap total lifting serta aset yang tidak lagi digunakan, kesesuaian kegiatan pe-

manfaatan ruang laut (KKPRL) yang prosesnya tidak paralel dengan UKL/UPL dan AMDAL, serta masalah serapan gas yang masih rendah, seperti kelebihan gas 100 BTUD di Jawa Timur dan 90 BTUD di Natuna.

Tidak hanya itu, Nevi juga menyoroti adanya aktivitas ilegal seperti ilegal drilling dan ilegal refinery yang potensinya mencapai 8.000 barrel per hari. Nevi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini.

Ia menegaskan pentingnya percepatan revisi regulasi, seperti PP No. 27/2017 dan PP No. 53/2017, untuk memberikan insentif pajak yang mendukung keekonomian investasi migas.

"Saya mendorong perbaikan sistem persetujuan lingkungan melalui digitalisasi, seperti penggunaan OSS/AmdalNet, serta penambahan personel yang dapat mempercepat proses perizinan. Pemerintah

BERIKUTNYA >>>

Politisi PKS Dorong Pemerintah Selesaikan Berbagai Isu Strategis Migas Demi Tarik Investasi Besar

« SEBELUMNYA

juga perlu mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama terkait masalah LP2B, KKPR, dan PBB," urai Nevi.

Anggota DPR periode ke dua ini menambahkan bahwa serapan gas yang optimal harus segera dilakukan agar tidak menghambat proyek gas alam yang berpotensi besar di masa depan.

Ia juga mendesak

pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap aktivitas ilegal di sektor migas dengan melakukan revisi Permen ESDM No. 1/2008 dan membentuk Direktorat Jenderal Gakkum di bawah Kementerian ESDM.

Dalam kesempatan lain, Anggota FPKS DPR RI ini meminta pemerintah dapat memperhatikan laporan sebuah perusahaan riset energi berbasis di Norwegia, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi

tujuan utama investasi migas di Asia Tenggara pada 2025 dengan porsi mencapai 60 persen dari total investasi migas di kawasan ASEAN.

Menurutnya, prediksi tersebut adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Nevi menyampaikan bahwa cadangan gas Indonesia yang besar, seperti yang ditemukan di Blok South Andaman dan Blok Geng North, serta cadangan super jumbo di Blok Masela, menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada energi melalui pengembangan gas alam.

Dengan adanya peningkatan investasi migas, ia optimistis target lifting migas dalam APBN 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari dan 5.629 juta kaki kubik gas per hari dapat tercapai.

"Saya mengingatkan bahwa kepercayaan investor harus dijaga dengan memastikan semua permasalahan yang menghambat sektor migas dapat segera diatasi. Jika tidak, peluang besar ini hanya akan menjadi mimpi. Pemerintah, mesti menunjukkan keseriusan dalam mendukung pengembangan migas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutup Nevi Zuairina.



"Saya mendorong perbaikan sistem persetujuan lingkungan melalui digitalisasi, seperti penggunaan OSS/AmdalNet, serta penambahan personel yang dapat mempercepat proses perizinan. Pemerintah juga perlu mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama terkait masalah LP2B, KKPR, dan PBB,"

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi XII DPR RI

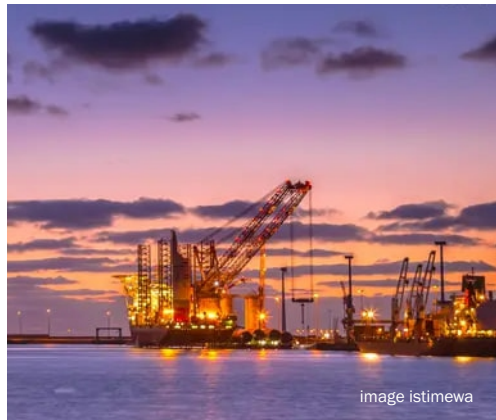


image istimewa

Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Aleg PKS: Anggaran Bisa Dialokasikan untuk Kesejahteraan Rakyat

Jakarta (19/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mendukung wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang sebelumnya disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto.

"PKS mendukung wacana Pilkada melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo. Sudah saatnya pelaksanaan Pilkada langsung dievaluasi secara menyeluruh," ungkap Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini.

Menurut Muzzammil, dana besar negara yang dihabiskan untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung terakhir bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

"Dalam beberapa pilkada serentak terakhir dari 2017, 2018, 2020, dan 2024 total anggaran yang digelontorkan menyentuh kisaran Rp 80,65

triliun. Dana besar tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, memberikan modal usaha, membangun ruang kelas baru, penambahan fasilitas kesehatan, irigasi pertanian dan lain sebagainya," jelas Muzzammil.

Lebih lanjut, Muzzammil menilai bahwa Pilkada langsung di beberapa lokasi telah membuka konflik dan polarisasi di tengah masyarakat serta terjadinya diskriminasi pembangunan.

"Kita saksikan pada sejumlah daerah, selama ini terjadi konflik dan polarisasi di

tengah masyarakat dalam proses Pilkada langsung. Selain itu, terjadi pula diskriminasi pembagian, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya," lanjut Muzzammil.

Menurut Muzzammil, Pilkada melalui DPRD dapat meminimalisir bahkan menghilangkan berbagai bentuk kecurangan yang biasa terjadi pada Pilkada langsung.

"Dalam Pilkada langsung selama ini berbagai kecurangan terjadi seperti politik uang yang meraja lela, keberpihakan oknum aparat untuk mendukung calon tertentu, politisasi dana bansos, permainan rekaptulasi suara, dan lain sebagainya. Jika Pilkada dipilih melalui DPRD, berbagai kecurangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Bawaslau dapat bekerjasama dengan Polisi, Jaksa, dan KPK untuk memperketat pengawasan, karena jumlah orang yang diawasi sangat terbatas," jelas Muzzammil.

Terakhir, Muzzammil menilai Pilkada melalui DPRD juga bagian dari proses yang demokratis, yg tidak bertentangan dengan Konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota



"Kita saksikan pada sejumlah daerah, selama ini terjadi konflik dan polarisasi di tengah masyarakat dalam proses Pilkada langsung. Selain itu, terjadi pula diskriminasi pembagian, seperti suatu desa yang tidak banyak memilih kandidat yang menang biasanya tidak diprioritaskan pembangunannya,"

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Komisi XIII DPR RI

'dipilih secara demokratis.'

"Kata demokratis pada pasal 18 ayat 4 dalam Konstitusi membuka ruang lebih luas untuk berbagai cara dan pros-

es pemilihan. Yakni bisa langsung, bisa melalui perwakilan. Sehingga pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD juga dimungkinkan", pungkaskan Muzzammil.



Aleg PKS, Meity Rahmatia Dukung Transparansi Rekrutmen Paskibraka

Makassar (19/12) — Anggota Komisi XIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia mendukung transparansi seleksi anggota pasukan pengibar bendera pusa-ka (Paskibraka) yang digagas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selain menepis isu nepotisme pada proses rekrutmen yang selama ini berkembang di tengah publik. Menurut Meity, upaya tersebut juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap seleksi nasional anggota Paskibraka.

"Proses ini bisa meningkatkan kepercayaan publik sehingga partisipasi dari putra dan putri terbaik bangsa kita juga bisa lebih tinggi. Seleksi ini menggunakan aplikasi dengan sistem terbuka, dan bisa diakses oleh anak-anak bangsa dari daerah manapun," jelasnya.

Meity menyampaikan dukungannya tersebut dalam kunjungannya ke kantor BPIP, Rabu (18/12/2024).

Ia juga menambahkan, dalam upaya ini, BPIP telah memberikan contoh sebagai lembaga yang dipercaya dalam pembinaan ideologi Pancasila.

"Mekanisme ini sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke dua dan sila ke lima. Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau anak petani,

nelayan, anak pejabat, anak pengusaha. Semua memiliki akses yang sama," ungkapnya.

Menjaga Keberagaman, Bukan Keseragaman

Selain rekrutmen, Meity dan anggota BPIP juga membincangkan sejumlah persoalan terkait Paskibraka lainnya. Diantaranya maksimalisasi potensi alumni Paskibraka yang dibina dalam program Pandu Ibu Indonesia Berpancasila oleh BPIP, dan peran pemerintah daerah dalam hal ini. Sekretaris Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam pertemuan terse-

but, lahir pula usulan dimasukkannya kembali kurikulum Pancasila yang telah disusun BPIP dalam pembinaan moral dan karakter siswa anggota Paskibraka.

Meity pun mendukung usulan tersebut. Namun, ia memberikan catatan, bahwa kurikulum BPIP idealnya tidak memaksakan tafsir personal dan melakukan penyeragaman seperti kasus buka jilbab pada Peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2024 lalu.

"Pancasila menjaga keberagaman, bukan keseragaman. Apalagi terkait cara berpakaian seperti yang terjadi pada 17 Agustus 2024."

"Dalam Islam misalnya, mayoritas mengakui jilbab adalah bentuk pengejawantahan nilai-nilai agama sebagaimana dijamin dalam sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa," pungkasnya.

"Mekanisme ini sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke dua dan sila ke lima. Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau anak petani, nelayan, anak pejabat, anak pengusaha. Semua memiliki akses yang sama,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



BKSAP Kunjungi WHO, Mardani: Bahas Kerja Sama Internasional Untuk Kesehatan



Jenewa (15/12) -- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan diplomasi ke World Health Organization (WHO) di Jenewa.

Pada kunjungan tersebut delegasi mengadakan pertemuan dengan Senior Officer WHO Ludy Suryantoro selaku Head of Unit WHO untuk kerja sama multi-pihak dan ketahanan kesehatan, beserta jajaran.

Pertemuan yang dilaksanakan di kantor pusat WHO di Jenewa tersebut merupakan pertemuan lanjutan antara BKSAP dan WHO, setelah sebelumnya kedua pihak bertemu di Bangkok dalam sebuah seminar terkait ketahanan kesehatan yang di fasilitasi oleh IPU.

Membuka jalannya pertemuan Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa kerja sama dibutuhkan dalam rangka membangun kemampuan Pencegahan, Persiapan dan Penanganan (Prevention, Preparedness and Response), terhadap kemungkinan timbulnya pandemi baru di masa yang akan datang.

"Alhamdulillah, negara kita Indonesia sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sampai 2024 ini telah menjangkau 98% dari total masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam rangka mempersiapkan diri, kita perlu

untuk bertukar pikiran dan pengalaman, sekaligus membangun kerja sama untuk ketahanan kesehatan dengan berbagai pihak, termasuk WHO." Demikian disampaikan oleh politisi PKS tersebut.

Pada kesempatan tersebut WHO juga menyampaikan presentasi yang menekankan pada pentingnya International Health Regulation dalam rangka membangun Prevention, Preparedness and Response.

WHO juga menyarankan

"Alhamdulillah, negara kita Indonesia sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sampai 2024 ini telah menjangkau 98% dari total masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam rangka mempersiapkan diri, kita perlu untuk bertukar pikiran dan pengalaman, sekaligus membangun kerja sama untuk ketahanan kesehatan dengan berbagai pihak, termasuk WHO."

pentingnya membangun kerja sama kesehatan sipil-militer dalam rangka menghadapi pandemi.

Hal tersebut terbukti berhasil menguatkan kemampuan negara dalam menghadapi pandemi. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara yang kerja sama kesehatan antara sipil dan militer-nya cukup sukses.

Pertemuan BKSAP dengan WHO itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh dari Fraksi Gerindra dan Bramantyo Suwondo dari Fraksi Demokrat, serta Anggota BKSAP yaitu; Trinovi Khairani dari Fraksi Golkar, Amelia Anggraini dari Fraksi Nasdem, Syarul Aidi Maazat dari Fraksi PKS, Hillary Brigitta Lasut dari Fraksi Demokrat serta Surya Utama dari Fraksi PAN.

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Ketua Badan Koordinasi Antar Parlemen DPR RI



Parlemen Indonesia dan Mesir Sepakat Dukung Palestina Hingga Merdeka

Kairo (17/12) — Gelombang dukungan Kemerdekaan Palestina terus menguat di berbagai negara dan forum-forum internasional.

Dukungan yang sama mengemuka dari pertemuan Delegasi Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI yang menggelar pertemuan khusus dengan Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir (17/12/2024).

Perihal kesepakatan dukungan Parlemen Indonesia dan Parlemen Mesir terhadap kemerdekaan Palestina tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang menjadi bagian dari Delegasi BKSAP DPR RI ke Mesir.

Jazuli Juwaini dalam pertemuan menegaskan bahwa sebagai anggota Parlemen kita punya tanggung jawab moral kemanusiaan untuk serius dan bahu membahu mewujudkan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

"Ini adalah panggilan kemanusiaan. Kita tidak boleh tinggal diam menyaksikan pembantaian setiap hari yang dilakukan oleh penjajah Israel. Menangis kita menyaksikan ribuan anak-anak, ibu-ibu dan lansia meninggal dengan tragis dibantai oleh tentara Israel," seru Jazuli sambil berkaca-kaca.

Oleh karena itu, lanjut Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP), tidak ada jalan lain seluruh

negara beradab di muka bumi ini harus bersatu menghentikan kebiadaban Israel dan totalitas dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. Indonesia dan Mesir bisa menjadi motor utama untuk mewujudkannya.

Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Mesir sepakat dengan Delegasi BKSAP untuk berjuang serius dan bersama guna menghentikan agresi Israel dan pembantaian masal di Gaza Palestina.

Mesir mengapresiasi sikap Parlemen, Pemerintah dan Rakyat Indonesia atas sikap yang selalu membela dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Mesir juga berkomitmen siap membantu menyalurkan berbagai bentuk bantuan dari Indonesia untuk rakyat Gaza Palestina melalui perbatasan negaranya.

Di akhir pembicaraan, Jazuli Juwaini tidak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah, Parlemen dan rakyat Mesir sekaligus menitipkan putra putri INDONESIA YANG SEDANG BELAJAR di Universitas Al-Azhar yang jumlahnya tidak kurang dari 15 ribu orang.

"Terima kasih dan apresiasi atas penerimaan putra putri Indonesia di Mesir khususnya yang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar. Mereka adalah generasi terbaik bangsa kami, yang menimba ilmu di universitas terbaik. Kami titip mereka. Anggaplah mereka sebagai putra putri sendiri," pungkas Jazuli.

Tidak ada jalan lain seluruh negara beradab di muka bumi ini harus bersatu menghentikan kebiadaban Israel dan totalitas dalam mendukung kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. Indonesia dan Mesir bisa menjadi motor utama untuk mewujudkannya.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Almuzzammil Yusuf Serap Aspirasi RUU Statistik di BPS Provinsi Lampung



Bandar Lampung (19/12) — Anggota DPR RI asal Lampung Almuzzammil Yusuf, melaksanakan kegiatan kunjungan kerja serap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada hari Selasa (17/12).

Dalam kunjungan kerja ini, Anggota DPR RI yang juga merupakan anggota Badan Legislasi, Almuzzammil Yusuf, hadir untuk mendengar masukan dari berbagai pihak. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Atas Parlindungan Lubis, bersama Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, serta Tim RUU BPS.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Ade Utami Ibnu, dan pejabat BPS dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/ kota.

Dalam sambutannya, Atas Parlindungan Lubis memaparkan sejumlah indikator makro Provinsi Lampung, seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyampaikan kebanggaan bahwa BPS Lampung terpilih sebagai salah satu forum untuk memperkaya substansi RUU Statistik.

“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari

upaya penting ini. Semoga forum ini membawa keberkahan dan menghasilkan Undang-Undang Statistik yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Atas Parlindungan Lubis.

Diskusi berlangsung dinamis dengan melibatkan masukan dari Kepala BPS kabupaten/ kota yang memiliki pengalaman langsung di lapangan.

Almuzzammil Yusuf mene-

kankan pentingnya masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan RUU Statistik dapat memenuhi kebutuhan era Big Data yang terus berkembang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Ade Utami Ibnu, turut mengapresiasi peran BPS.

“Data BPS selama ini menjadi acuan penting dalam setiap diskusi di DPRD. Saya yakin kontribusi BPS akan semakin signifikan dengan adanya RUU Statistik ini,” ungkapnya.

Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menyusun undang-undang yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mendukung pembangunan berbasis data di Indonesia.

Perlu masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan RUU Statistik dapat memenuhi kebutuhan era Big Data yang terus berkembang.

Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.

Anggota Badan Legislasi DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Abstrakif Substantif

KUALIFIKASI INFORMATIF

PARTAI POLITIK^{IK}

1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-PERJUANGAN)
4	PARTAI DEMOKRAT

Alhamdulillah

PKS

mendapatkan Anugerah
Keterbukaan Informasi Publik 2024
Kategori Informatif



fraksi.pks.id



FPKS DPR RI



fraksipksdprri



@FPKSDPRRI



PKS TV DPR RI

Saat Reses di Dapil, Habib Aboe Prihatin Peredaran Narkoba 'Seperti Jualan Permen'

Banjarmasin (20/12) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan reses di daerah pemilihannya di Kalimantan Selatan, Jum'at (20/12).

Dalam kunjungan tersebut, Aboe Bakar menerima laporan dari masyarakat mengenai maraknya peredaran narkoba yang disebut 'seperti jualan permen'.

Menanggapi laporan itu, Aboe Bakar mendatangi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Selatan untuk memberikan dukungan dan mencari solusi atas permasalahan ini.

"Saya dengar di Astambul marak penjualan narkoba, bahkan lapaknya terbuka sudah kayak jualan permen. Hal seperti ini harus direspon cepat, karenanya kita koordinasi dengan BNP Kalsel", terang Anggota DPR RI Dapil I Kalsel tersebut.

Kepala BNP Kalsel, Wisnu,

menyambut baik kunjungan tersebut dan memberikan penjelasan terkait situasi di lapangan.

"Situasi di Astambul memang demikian, namun kami sudah melakukan tindakan. Kami sudah amankan 1,7 ons narkoba di sana", terangnya.

Pada pertemuan itu, Aboe Bakar secara langsung mempertanyakan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah yang menjadi perhatian masyarakat.

"Saya kira beberapa tempat lain juga perlu mendapatkan atensi, seperti kampung Arab dan gang Jemaah, itu wilayah yang disebut

masyarakat sebagai lokasi rawan peredaran narkoba", terang Sekjend DPP PKS.

Wisnu menyampaikan bahwa BNP Kalsel telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani peredaran narkoba di wilayah-wilayah tersebut.

"Wilayah tersebut memang pernah menjadi atensi, peredaran di daerah tersebut kini sudah tertangani dengan baik berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Kita sudah banyak melakukan penetrasi, Alhamdulillah kondisinya membaik", terang Wisnu.

Habib Aboe Bakar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk memerangi peredaran narkoba.

"Peredaran narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi muda kita. Tidak boleh ada kompromi dalam pemberantasannya," tegasnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Aboe Bakar sebagai Wakil Rakyat untuk memastikan bahwa pemberantasan narkoba terus menjadi prioritas di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah-daerah yang menjadi pusat laporan masyarakat.



"Wilayah tersebut memang pernah menjadi atensi, peredaran di daerah tersebut kini sudah tertangani dengan baik berkat kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Kita sudah banyak melakukan penetrasi, Alhamdulillah kondisinya membaik"

**HABIB ABOE
BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI



image istimewa

Saadiah Uluputty Terus Dorong Produksi Usaha Pengolahan Ikan di Maluku

Maluku (24/12) --- Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mendorong pelaku usaha perikanan mengembangkan potensi nilai jual hasil tangkap ikan menjadi produk olahan, yang punya daya tarik dan daya saing di pasar global.

Hal tersebut diungkapkan Saadiah ketika mengunjungi Dusun Aira, Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

"Sebagai daerah penghasil ikan terbanyak di pesisir selatan Pulau Seram, sudah saatnya masyarakat berinovasi mengembangkan sentra ekonomi rakyat, dengan pengelolaan produk usaha perikanan yang terukur dengan dukungan pemerintah," Tutur Srikandi PKS Maluku ini.

Kunjungan sekaligus dengan Bimtek kepada seluruh nelayan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, supaya mampu mengolah hasil tangkap ikan

nelayan menjadi produk pengolahan ikan dengan nilai ekonomi yang tinggi.

Sekaligus menjadi sarana penjangkaran aspirasi masyarakat nelayan, seperti permintaan sarana prasarana alat tangkap bagi nelayan, talud penahan ombak, dan pelabuhan untuk sandaran perahu-perahu nelayan sebagai daya dukung nelayan.

Bimtek yang digelar pada 10 Desember 2024 ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Bapak Ahmad Hidayat serta BRI setempat.

"Sebagai daerah penghasil ikan terbanyak di pesisir selatan Pulau Seram, sudah saatnya masyarakat berinovasi mengembangkan sentra ekonomi rakyat, dengan pengelolaan produk usaha perikanan yang terukur dengan dukungan pemerintah,"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Kasus DBD Jabar Meningkat,

Surahman: Faskes Harus Ekstra Sigap dan Masyarakat Lebih Preventif

Jakarta (12/12) — Anggota Legislatif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Surahmat Hidayat menyoroti terkait kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jawa Barat yang terus meningkat sepanjang tahun 2024.

Menurut Surahman, fasilitas kesehatan di Jawa Barat, khususnya rumah sakit, harus ekstra sigap dalam melayani pasien-pasien DBD ditengah kasus DBD yang semakin meningkat di Jawa Barat.

"Karena dari 55.251 kasus yang terjadi di Jawa Barat, sebanyak 313 penderita di antaranya meninggal dan mayoritas akibat terlambat mendapatkan pertolongan medis," ujar Surahman.

Disamping itu, Surahman juga menyampaikan agar masyarakat segera memeriksa diri atau membawa anggota keluarganya ke fasilitas kesehatan terdekat jika

mengalami demam yang tidak jelas selama 3 (tiga) hari dan tidak kunjung turun.

"Jika mengalami demam yang tidak jelas selama 3 (tiga) hari dan tidak kunjung turun masyarakat harus segera memeriksakan diri atau membawa anggota keluarga yang demam ke faskes terdekat atau rumah sakit untuk memastikan terjangkit DBD atau tidak. Jangan sampai tunggu sampai terjadi syok dengue, karena kondisi tersebut jika tidak segera ditangani dapat berakibat fatal," imbuh Surahman.

Surahman prihatin dengan kondisi para tenaga kesehatan yang kelelahan disaat harus

melayani pasien DBD yang membludak, Surahman juga menghimbau masyarakat Jawa Barat harus berperan aktif melakukan tindakan preventif terhadap demam berdarah dengue (DBD) untuk meringankan beban para petugas medis.

"Untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD), masyarakat secara bersama-sama harus giat melakukan program 3M Plus, yaitu menguras wadah-wadah penampung air, menutup wadah-wadah yang berpotensi menampung air, membuang barang-barang yang tidak digunakan dan dapat menampung air," ungkapnya.

Selain melakukan program 3M plus, lanjut Surahman, masyarakat harus menjaga kebersihan rumah dan rutin memberikan saluran air dan parit.

"Disamping itu, juga menerapkan pola makan sehat karena nyamuk lebih menyukai darah seseorang yang memiliki kadar kolesterol tinggi," imbuh Surahman.

Bagi pencinta flora dan fauna, Surahman juga menyampaikan bahwa masyarakat bisa memelihara ikan pemakan jentik-jentik nyamuk dan menghisap rumah dengan tanaman antinyamuk seperti serai wangi, bunga lavender, daun peppermint, dan bunga geranium yang dapat dilettakkan di lokasi strategis.

"Dengan peran aktif masyarakat melakukan tindakan preventif secara bersama-sama



"Untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD), masyarakat secara bersama-sama harus giat melakukan program 3M Plus, yaitu menguras wadah-wadah penampung air, menutup wadah-wadah yang berpotensi menampung air, membuang barang-barang yang tidak digunakan dan dapat menampung air,

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat X

diharapkan angka kasus akan berkurang dan terus menurun di Jawa Barat," ujar Surahman.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kasus DBD sejak Januari sampai Desember 2024 sudah mencapai 55.251 kasus yang

terjadi di seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Daerah dengan jumlah kasus DBD tertinggi di Jawa Barat adalah Kota Bandung (7.268 kasus) dan jumlah kasus terendah adalah Kota Banjar, yakni 357 kasus.

Anggota FPKS Harap Pemerintah Pusat Lakukan Reboisasi untuk Cegah Bencana di Brebes

Brebes (21/12) — Banjir bandang, longsor, dan bencana alam lainnya telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Angka korban, kerugian materi, dan kerusakan lingkungan akibat bencana terus ada dalam beberapa tahun terakhir.

Menanggapi situasi darurat ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil tindakan konkrit dalam mencegah bencana jangka panjang di Brebes.

"Saat bertemu dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes di masa reses bulan Desember 2024 ini, saya menerima aspirasi bahwa penyebab bencana alam di Brebes diantaranya banjir yang disebabkan tanggul sungai jebol," kata pria yang akrab disapa Fikri, dalam keterangannya, Sabtu (21/12). Sementara, kewenangan

pengelolaan Sungai adalah dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung.

"Selain itu, Longsor diakibatkan penggundulan hutan di hulu cukup parah, karena berdasarkan informasi, sedikitnya 154 hektar lahan hutan lindung di kaki gunung Slamet bagian barat di wilayah Brebes dan Tegal rusak akibat pembalakan dan aktivitas pertanian," ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sehingga, salah satu langkah paling efektif adalah melakukan reboisasi besar-besaran di kawasan hutan yang rusak.

"Berdasarkan data yang kami terima dari BPBD Brebes,

kerusakan hutan di hulu menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di wilayah ini, selain itu sedikitnya 154 hektar hutan lindung di kaki Gunung Slamet bagian barat, misalnya, telah mengalami kerusakan parah akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan," jelas peraih gelar doktor ilmu lingkungan hidup Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang ini.

Fikri juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung untuk bersinergi.

"Juga Pemerintah Daerah di kawasan tersebut, yakni Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang dan Tegal membuat kesepakatan bersama agar menjadikan kawasan itu menjadi kawasan hutan lindung atau ada jalur kawasan hutan lindung," paparnya.

Solusi Komprehensif

Selain reboisasi, Fikri juga menyoroti pentingnya upaya-upaya lain untuk mengurangi risiko bencana di Brebes. Yang pertama adalah perbaikan Infrastruktur, yakni dengan memperkuat tanggul sungai, membangun sistem drainase yang memadai, dan melakukan normalisasi sungai.

Kemudian yang kedua adalah sistem Peringatan Dini, yakni mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi



Longsor diakibatkan penggundulan hutan di hulu cukup parah, karena berdasarkan informasi, sedikitnya 154 hektar lahan hutan lindung di kaki gunung Slamet bagian barat di wilayah Brebes dan Tegal rusak akibat pembalakan dan aktivitas pertanian,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

kepada masyarakat sebelum bencana terjadi.

"Selanjutnya adalah edukasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga

lingkungan dan mengurangi risiko bencana," pungkas legislator dari daerah pemilihan IX Jateng (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

Tanam 32 Ribuan Pohon Mangrove

Johan Rosihan Kolaborasi TNI, Polri, dan Komunitas untuk Lingkungan Berkelanjutan

Sumbawa Besar (21/12) --- Sebuah langkah nyata dalam upaya pelestarian lingkungan hidup telah berhasil dilaksanakan pada pagi hari ini di pesisir Dusun Keramat, Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan penanaman mangrove yang melibatkan berbagai elemen masyarakat berhasil menanam sebanyak 32.000 pohon mangrove di lahan seluas sekitar 8 hektare, menggunakan metode Rumpon Berjarak yang efektif untuk menjaga pertumbuhan mangrove dan ekosistemnya.

Kegiatan ini diinisiasi melalui kolaborasi antara Relawan Johan Rosihan TNI, Polri, kelompok peduli lingkungan Palung Lestari, serta perangkat Desa Tarusa. Keberhasilan kegiatan ini mencerminkan

semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan, sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara elemen masyarakat dan instansi pemerintah dalam upaya pelestarian alam.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi atas semangat dan kerja sama semua pihak.

"Penanaman mangrove ini bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga membangun masa depan yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berke-

lanjutan bagi generasi mendatang. Mangrove memiliki manfaat yang sangat besar, mulai dari melindungi pesisir dari abrasi hingga menjadi habitat penting bagi ekosistem laut," ujar Johan dalam sambutannya.

Sistem Rumpon Berjarak yang digunakan dalam penanaman ini memungkinkan mangrove tumbuh lebih optimal, karena memberikan ruang yang cukup untuk akar berkembang, sekaligus mendorong pembentukan habitat alami bagi biota laut.

Hutan mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap pesisir dari ancaman abrasi, mengurangi dampak perubahan iklim, serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.

Perangkat Desa Tarusa juga menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas keberhasilan kegiatan ini. Mereka berharap upaya pelestarian lingkungan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Sumbawa maupun Indonesia secara umum.

"Kegiatan penanaman ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir, khususnya hutan mangrove, sebagai bagian dari solusi terhadap tantangan lingkungan global", tegas Johan politisi asal Sumbawa ini.



"Kegiatan penanaman ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir, khususnya hutan mangrove, sebagai bagian dari solusi terhadap tantangan lingkungan global",

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I

"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap lingkungan, penanaman mangrove ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat

ekologis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keberlanjutan sumber daya alam di kawasan pesisir", tutup Johan



Hadiri Syukuran dan Konsolidasi,

Anis Byarwati Tegaskan PKS Tetap Berjuang dan Berkhidmat pada Rakyat

Jakarta (12/12) — Setelah rangkaian Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) usai, Anis Byarwati menghadiri acara syukuran dan konsolidasi anggota PKS

yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kelurahan (DPRa) PKS Ciracas di Ceger, Ciracas, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan ini, Anis yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota PKS DPRa Ciracas dan semua elemen yang telah bahu membahu, tolong menolong, bersinergi dan berkolaborasi dalam menunaikan amanah sebagai warga negara Republik Indonesia dan anggota PKS di wilayah Ciracas.

Politisi senior dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Jakarta Timur ini menegaskan, "Koalisi ataupun oposisi, tidak merubah jati diri PKS. PKS tetap berjuang bersama rakyat, istiqomah memperjuangkan kebenaran dan

senantiasa berkhidmat kepada rakyat, apapun keputusan politiknya."

Anis Byarwati yang juga Ketua Dewan Pengurus Pusat [DPP] PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan menekankan, "PKS adalah partai dakwah yang berjuang untuk Allah, sampai kapanpun hidup dan hati kita untuk PKS, kita tidak rela bila niat kita dikotori oleh selain Allah. Niat kita harus senantiasa murni dan lurus untuk Allah."

Selanjutnya, Anis mengingatkan bahwa tidak ada kemenangan selain dari sisi Allah.

"Kemenangan diberikan oleh Allah kepada hamba yang kehendaki Nya. Kalau hasilnya belum sesuai dengan harapan dan keinginan kita, ingatlah bahwa kita telah berjuang

semampu dan seoptimal yang kita bisa lakukan, selanjutnya Allah lah Yang Maha menentukan," tandasnya.

"Kebaikan itu adalah apa yang telah Allah pilih untuk kita. Maka, setiap apa yang Allah tentukan dan takdirkan untuk kita, sudah pasti baik menurut Nya. Maka tawakal setelah kita melakukan segala daya upaya adalah sebuah keniscayaan. Kemudian menerima hasil yang ditetapkan Nya adalah kemestian," paparnya.

Anis juga mengingatkan pentingnya evaluasi dilakukan, untuk mengetahui mana usaha dan upaya yang masih kurang optimal untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

"Evaluasi bukan berarti menentang takdir Allah, namun bagian dari menyempurnakan penunaian amana. Kita memiliki keinginan, Allah memiliki keinginan, dan yang terjadi adalah keinginan Allah. Disinilah keimanan kita kepada rukun iman keenam diuji, yaitu iman dan percaya kepada qada dan qadar Nya."



"Evaluasi bukan berarti menentang takdir Allah, namun bagian dari menyempurnakan penunaian amanah. Kita memiliki keinginan, Allah memiliki keinginan, dan yang terjadi adalah keinginan Allah. Disinilah keimanan kita kepada rukun iman keenam diuji, yaitu iman dan percaya kepada qada dan qadar Nya."

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

Menutup sambutannya Anis menandakan, "Allah melihat proses dan usaha kita, bukan hasilnya, karena hasil adalah ranah Allah subhaanahu

wa ta'aala, proses sekecil apapun, Allah akan cukupkan ganjaran dan balasannya, tidak akan ada yang dizholimi oleh Nya sedikitpun."



Rofik Hananto Serahkan Batuan Beasiswa PIP Untuk Ratusan Siswa SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara

Banjarnegara (11/12) –& Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menyerahkan Batuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diselenggarakan di SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara pada Selasa (10/11).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah SMK Cokroaminoto 2, Ngusman dan Ketua Plt Umum Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto, Budi Santoso.

Rofik mengatakan bahwa program yang diberikan pemerintah ini bertujuan untuk memastikan anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan akses pendidikan.

“Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai untuk perluasan akses, serta kesempatan belajar kepada siswa untuk keluarga miskin atau rentan miskin semoga bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi anak-anak di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan.” Ujar Rofik.

Diketahui, Bantuan Program Indonesia Pintar diberikan kepada siswa yang aktif bersekolah di SD, SMP, atau SMA/ K, berasal dari sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan memiliki orang tua dengan penghasilan kurang dari Rp 5.000.000 per bulan.

Jenis SK PIP sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu SK Pemberian, SK Nominasi, dan

SK Relaksasi. SK Pemberian adalah penerima yang sudah memiliki rekening PIP dapat langsung mencairkan dana.

SK Nominasi adalah penerima harus mengaktifkan rekening di bank penyalur. Sedangkan SK Relaksasi adalah dana yang sudah masuk ke rekening penerima.

Kepala Sekolah SMK Cokroaminoto 2, Ngusman, mengatakan bahwa berterima kasih atas bantuan PIP yang telah diberikan dengan nominal yang mencapai lebih dari 500 juta.

“Saya berterima kasih pada pihak-pihak yang membantu

adanya program PIP di sekolah ini. Alhamdulillah sekolah kami mendapat bantuan PIP yang jumlahnya mencapai 383 penerima beasiswa PIP, yang jika di total bisa sampai 500 juta lebih.” Ungkap Ngusman.

Diketahui, SMK Cokroaminoto 2 Banjarnegara mencatat jumlah penerima PIP terbanyak di Banjarnegara dengan 383 siswa yang menerima bantuan. Dengan rincian bantuan SK Pemberian sebanyak 29 siswa, SK Relaksasi sebanyak 354 siswa, 174 siswa menerima Rp. 900.000 dan 209 siswa menerima Rp. 1.800.000. Total bantuan mencapai Rp.532.800.000.

Rofik berharap, Program Indonesia Pintar dapat mencegah putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, membantu siswa menyelesaikan pendidikan menengah, dan meringankan biaya pendidikan.

“Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai untuk perluasan akses, serta kesempatan belajar kepada siswa untuk keluarga miskin atau rentan miskin semoga bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi anak-anak di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan.”

H. ROFIK HANANTO, S.E
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII



image istimewa

Kunjungan Reses ke Sidoarjo, Reni Astuti Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Banjir

Surabaya (20/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak banjir di Desa Gempol Klutuk, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

Reni Astuti berkesempatan untuk hadir mengunjungi desa tersebut pada hari Senin (16/12/2024), untuk bertemu langsung dengan para korban sekaligus menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai untuk mereka.

Dalam kunjungannya, Reni menyatakan bahwa meskipun banjir telah surut, kehidirannya

merupakan bentuk kepedulian sebagai anggota DPR RI terhadap konstituenya.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dan bermanfaat bagi warga yang terdampak

"Alhamdulillah, berkat koordinasi dengan Pak Kades dan perwakilan PKS, kegiatan ini dapat berjalan lancar. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga," ujar Reni.

Dalam sambutannya Reni juga turut menyampaikan tugasnya sebagai Anggota DPR RI. Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Reni menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan bagi anak-anak Indonesia, dengan harapan tidak ada lagi anak

yang putus sekolah.

"Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Kita harus memastikan bahwa anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan minimal hingga tingkat SLTA, agar mereka memiliki keterampilan dan dapat mandiri," tegasnya.

Tokoh masyarakat, Kepala Desa beserta jajaran Desa Gempol Klutuk, juga turut hadir dan mendampingi dalam kunjungan tersebut. Mereka memberi apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Reni Astuti.

Politisi PKS itu berharap sinergi antara pemerintah desa dan perwakilan rakyat dapat terus terjalin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reni Astuti berkomitmen untuk terus hadir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, dalam berbagai kondisi.

"Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Kita harus memastikan bahwa anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan minimal hingga tingkat SLTA, agar mereka memiliki keterampilan dan dapat mandiri,

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur I



Achmad Ru'yat Gelar Silaturahmi dengan Insan Pers Bogor Raya

Kabupaten Bogor (18/12) --- Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Achmad Ru'yat menggelar silaturahmi dengan beberapa kelompok dan organisasi wartawan se-Bogor Raya, Selasa (17/12/2024).

Acara yang berlangsung di resto Kampung Kecil, Kabupaten Bogor ini dihadiri oleh Ketua PWI Kabupaten Bogor terpilih Dedy Firdaus, Ketua PWI Kota Bogor Aldo Herman, Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Saiful Ramadhan, Ketua APMI Iman Rahman, Pengurus PWI Jabar Mochamad Yusuf beserta para insan pers dan pengusaha media Bogor Raya termasuk perwakilan Bogorkita.

Aspirasi pertama datang dari Dedy Firdaus dimana dirinya berharap kedepan, Ru'yat bisa menggelar sarasehan bagi wartawan-wartawan Kabupaten Bogor.

"Jumlahnya sekitar 200 hingga 300 orang peserta, kami rasa jumlah tersebut cukup untuk membangun para insan pers di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Ketua PWI Kota Bogor, Aldo Herman juga menyampaikan harapannya agar Ru'yat bisa mendorong program-program yang berkaitan dengan komisi kerjanya yaitu komisi IX agar bisa dimanfaatkan oleh awak media dan masyarakat Bogor

Raya.

"Tentu kami sebagai mitra kerja beliau bakal secara amanah bersinergi dengan program-program yang nanti bisa didorong ke Bogor Raya," kata Aldo.

Kemudian Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Saiful Ramadhan juga mengungkapkan aspirasinya dimana kehadiran Ru'yat di DPR RI mampu mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Bogor.

"Contohnya soal RSUD

Parung yang belum lengkap fasilitasnya, kemudian penyelesaian jalan Bomang serta kejelasan pembangunan jalur Puncak 2," sebut Saiful.

Selanjutnya dari Ketua APMI, Iman Rahman berharap sinergitas antara DPR RI dengan media-media di wilayah Bogor Raya bisa dikonkretkan dalam bentuk kerjasama nyata untuk membangun Kabupaten Bogor dari sisi media.

Merespons beberapa aspirasi tersebut Ru'yat bakal memprioritaskan satu per satu apa yang menjadi harapan para wartawan di Bogor Raya.

"InshaAllah saya akan menjabat selama 5 tahun, tentu satu persatu kami akan coba advokasi apa yang menjadi harapan rekan-rekan media di Kabupaten maupun Kota Bogor," tandasnya.

"InshaAllah saya akan menjabat selama 5 tahun, tentu satu persatu kami akan coba advokasi apa yang menjadi harapan rekan-rekan media di Kabupaten maupun Kota Bogor,"

drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif, Aktif, Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Kunjungi Petani di Dapil, Amin Ak Dorong Penggunaan Pupuk Cair untuk Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Lumajang (13/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengunjungi kelompok petani dalam rangkaian kegiatan reses di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (13/12/2024).

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim 4 itu mengunjungi Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan (FK P4S) Asri Farm di Kedung Rejo, Rowokanngung, Kabupaten Lumajang. FK P4S Asri Farm aktif

dalam pembangunan pertanian melalui pelatihan bagi petani dan masyarakat di wilayahnya.

Pelatihan yang dilakukan mirip sekolah lapang pertanian yang fokus untuk mendorong produktivitas sektor pertanian.

Selain berdialog dengan kelompok tani, Amin juga mengunjungi stasiun pengolahan pupuk cair organik yang terbuat dari limbah ternak sapi dan kambing.

"Saya mendorong penggunaan pupuk cair organik secara masif untuk mendorong produksi pertanian, terutama pangan," tegas Amin.

Ia berharap pemerintah mendukung dan mengembangkan produksi pupuk cair organik.

"Juga perlu ada sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara masif agar semakin banyak petani mengurangi penggunaan pupuk kimiawi," imbuhnya.

Selama ini, kata Amin, petani berharap mendapatkan pupuk bersubsidi dalam jumlah cukup. Namun persoalannya, pemerintah hanya mampu mengalokasikan sekitar 9,55 juta ton pupuk bersubsidi.

Sedangkan kebutuhan pupuk untuk petani secara nasional sekitar 24 juta ton. Dan kapasitas produksi pupuk nasional sekitar 14 juta ton. Selisih yang cukup besar tersebut berdampak pada seringnya terjadi kelangkaan pupuk di berbagai daerah.

"Apa yang dilakukan P4S Asri Farm ini luar biasa, selain memberikan solusi kebutuhan pupuk, juga mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia bersubsidi," beber Amin.

Pelatihan dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Penggunaan pupuk berimbang yang mengombinasikan fungsi pupuk kimia dan hayati terbukti mampu menjaga daya dukung lahan dan meningkatkan produktivitas.

Saat ini stasiun pupuk organik mandiri milik P4S Asri Farm dalam sekali produksi mampu menghasilkan 2.000 liter pupuk organik cair berbahan dasar kotoran ternak.

Petani bisa membelinya dengan harga Rp5 ribu per liter sebagai upaya mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Menurut Ketua F4S Asri Farm, Ahmad Dahlan penggunaan pupuk cair organik mampu menghemat pengeluaran petani antara Rp 1 juta hingga Rp1,4 juta per hektare per musim. Produktivitas pun meningkat dari rata-rata sekitar 4 ton menjadi 5 ton per hektare.

"Apa yang dilakukan P4S Asri Farm ini luar biasa, selain memberikan solusi kebutuhan pupuk, juga mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia bersubsidi,"

AMIN AK, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Timur IV



image istimewa

Banjir Ponorogo, Riyono Langsung Terjun ke Lokasi dan Berikan Bantuan

Ponorogo (19/12) — Hujan deras yang mengguyur Ponorogo semalam penuh membutuhkan meluapnya sungai yang dekat dengan Kec Kota Ponorogo. Kejadian banjir mulai pukul 22.40 minggu 15 Desember 2024.

Banjir tak hanya genangan hujan, banjir juga diperparah dengan adanya tanggul yang jebol di wilayah Kelurahan Paju di Kecamatan Ponorogo Kota dan Kecamatan Jetis.

"Untuk saat ini kondisi yang terparah, di Kelurahan Kepatihan, Pekunden dan Brotonegaran karena memang tanggul jebol," Kata Riyono Aleg DPR FPKS yang meninjau langsung ke lokasi banjir.

Tak hanya ratusan warga mengungsi, musibah banjir itu menelan dua korban jiwa. Yakni bocah bernama Achir Bagus

Dwi Ardhianto (12) dan Imam Suhada (53) yang berusaha menolongnya.

Riyono bersama Relawan PKS Kabupaten Ponorogo sigap memberikan layanan siap santap sejak senin 16 Desember 2024, ada ratusan bungkus makanan yang di salurkan oleh PKS kepada korban banjir.

"Saya tau banjir dan langsung ke Ponorogo untuk memberikan bantuan, ada uang dan juga makanan siap saji untuk meringankan beban korban banjir," tutup Riyono.

"Untuk saat ini kondisi yang terparah, di Kelurahan Kepatihan, Pekunden dan Brotonegaran karena memang tanggul jebol, Saya tau banjir dan langsung ke Ponorogo untuk memberikan bantuan, ada uang dan juga makanan siap saji untuk meringankan beban korban banjir,"

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VII



image istimewa

Salurkan Bantuan Kebakaran Kemayoran, HNW Minta Pemerintah Siapkan Hunian Bagi Korban

Jakarta (12/12) --- Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII dari FPKS ; Hidayat Nur Wahid mengunjungi dan menyalurkan bantuan bagi warga korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, yang terjadi pada Selasa (10/12/2024).

HNW sapaan akrabnya menyemangati dan menerima aspirasi warga korban kebakaran yang berharap segera dibantu dibangun hunian tetap agar tidak kesulitan melanjutkan aktifitas kehidupan jika terlalu lama berada di pengungsian.

"Banyak diantara korban adalah lansia dan anak-anak yang membutuhkan lingkungan kondusif untuk melanjutkan hidup. Saya mengapresiasi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah Khusus Jakarta yang akan menyiapkan hunian sementara di 'rusun', tapi agar juga segera menyiapkan hunian tetap yang layak bagi mereka," ujar Hidayat di posko pengungsian SDN 09 Kemayoran, Kamis (12/12/2024).

Berdasarkan data BPBD Jakarta, kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran ini menghancurkan lebih dari 200 rumah yang berdampak pada 600 KK atau 1800 jiwa.

Dalam kunjungannya, Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini selain

memberikan langsung bantuan moril dan materiil juga turut menggandeng Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai mitra kerja di Komisi VIII DPR-RI.

Bantuan yang disalurkan di antaranya adalah 1800 paket makanan siap saji, 300 lembar kasur, 300 lembar selimut, 200 paket tenda gulung, 300 lembar family kit, 100 paket perlengkapan anak termasuk tas dan peralatan sekolah, dan 100 paket sembako.

HNW mengapresiasi kedua mitra kerjanya tersebut yang aktif dan responsif menghadirkan bantuan bagi warga korban bencana, khususnya ketika terjadi di wilayah Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat.

"Hari ini bersama Pak Lilik Deputy Bidang Logistik Peralatan BNPB dan Pak Adrianus Alla Direktur PSKBNSA Kemensos, juga unsur Pemerintah Daerah, kami hadir berkolaborasi dalam rangka menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran

BERIKUTNYA >>>

Salurkan Bantuan Kebakaran Kemayoran, HNW Minta Pemerintah Siapkan Hunian Bagi Korban

« SEBELUMNYA

Kemayoran. Kolaborasi ini penting untuk terus dioptimalkan agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari wakil mereka di DPR dan DPRD juga adanya program kerja yang telah dicanangkan Pemerintah, khususnya program bantuan sosial bagi mereka yang sedang tertimpa bencana

seperti kebakaran,” lanjutnya.

Selain bersama unsur Pemerintah, Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini dalam rangka Reses DPR-RI juga membuka posko bantuan bersama DPC PKS Kemayoran, menyediakan bahan pangan, susu, obat-obatan, keperluan anak-anak, sanitasi, dan pakaian layak pakai bagi siapapun korban tanpa melihat latar belakang



pilihan politik maupun calon Gubernurnya.

Diharapkan pendirian posko PKS tersebut bisa menginspirasi kelompok masyarakat lainnya, sehingga semakin banyak bantuan yang diterima para penyintas dan bisa meringankan kesulitan yang sedang mereka alami.

“Tentu penyediaan hunian baik sementara maupun tetap bagi para korban kebakaran perlu waktu dan kolaborasi dengan banyak pihak. Selama proses tersebut inisiatif masyarakat untuk turut membantu menggalang bantuan patut diapresiasi dan harus terus didorong, sebagai bentuk solidaritas dan penguatan soliditas di tengah masyarakat,” tuturnya.

HNW yang dalam kunjungan tersebut selain membagikan bantuan juga menyemangati warga dan mengingatkan mereka untuk mengambil hikmah dari peristiwa musibah ini

HNW pun ikut menghibur anak-anak para korban di layanan psikososial agar mereka tetap tabah, sehat dan bersemangat.

“Alhamdulillah mereka menyambut positif dan antusias kehadiran, saran dan bantuan yang disalurkan hari ini,” pungkasnya



“Banyak diantara korban adalah lansia dan anak-anak yang membutuhkan lingkungan kondusif untuk melanjutkan hidup. Saya mengapresiasi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah Khusus Jakarta yang akan menyiapkan hunian sementara di 'rusun', tapi agar juga segera menyiapkan hunian tetap yang layak bagi mereka,

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Reses di Kabupaten Purwakarta, Haji Jalal Dorong PLN Jadi Perusahaan Energi Top Dunia

Purwakarta (19/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi XII, Jalal Abdul Nasir melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, tepatnya di Kabupaten Purwakarta, pada Kamis, (19/12).

Dalam kesempatan ini, Haji Jalal menyampaikan aspirasi dan gagasannya untuk mendorong PLN menjadi salah satu perusahaan energi terbaik di dunia.

Acara reses yang berlangsung di salah satu aula pertemuan di Purwakarta ini dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Haji Jalal ini menyoroti peran strategis PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan energi global.

"PLN memiliki potensi besar untuk menjadi perusahaan energi top dunia. Dengan tata

kelola yang baik, inovasi teknologi, dan fokus pada energi terbarukan, saya yakin PLN bisa bersaing di pasar global," tegas Haji Jalal.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, regulasi yang pro-inovasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transformasi PLN. Menurutnya, agenda transisi energi, seperti pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, perlu menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Selain itu, Haji Jalal juga menyampaikan bahwa peran PLN sangat vital dalam menye-

diakan energi listrik yang merata hingga ke pelosok daerah.

"Kita harus memastikan semua masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, mendapatkan akses listrik yang berkualitas dan terjangkau," ujarnya.

Masyarakat yang hadir turut menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan listrik di daerah mereka, seperti masalah ketersediaan daya di wilayah pedesaan dan upaya pengembangan energi ramah lingkungan.

Haji Jalal berkomitmen untuk membawa masukan ini ke dalam forum di DPR dan mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Reses ini juga menjadi momentum bagi Haji Jalal untuk menjalin komunikasi langsung dengan konstituennya, mendengarkan keluhan, dan memberikan laporan kinerja selama masa sidang.

Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif dan sesi foto bersama para peserta.

Dengan penuh semangat, Haji Jalal Abdul Nasir berjanji untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Purwakarta dan mendukung kemajuan PLN sebagai motor penggerak pembangunan bangsa.

"Mari bersama kita dukung PLN untuk tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga kebanggaan dunia," pungkasnya.



"PLN memiliki potensi besar untuk menjadi perusahaan energi top dunia. Dengan tata kelola yang baik, inovasi teknologi, dan fokus pada energi terbarukan, saya yakin PLN bisa bersaing di pasar global,"

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII



image istimewa

Masa Reses, Nevi Zuairina Perkuat Silaturahmi dan Teguhkan Komitmen Advokasi

Pariaman (23/12) — Dalam upayanya memperkuat hubungan dengan masyarakat dan memastikan setiap aspirasi rakyat mendapat tempat dalam kebijakan nasional, Anggota DPR RI Komisi XII dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina kembali melakukan silaturahmi dengan para pemilih di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

Melalui kegiatan reses yang sarat makna, ia tak hanya menyapa masyarakat, tetapi juga mendengar langsung kebutuhan mereka untuk dipertanggungjawabkan di tingkat nasional.

Di Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Nevi bertemu dengan jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan masyarakat setempat dalam suasana penuh kehangatan.

Dalam dialog tersebut, ia menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang erat antara wakil rakyat dan konstituentnya.

“Silaturahmi seperti ini bukan hanya mempererat hubungan personal, tetapi juga menjadi wadah untuk memastikan setiap aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan dan diperjuangkan,” ujarnya.

Lebih jauh, Politisi PKS ini memaparkan berbagai program yang menjadi fokusnya di Komisi XII, khususnya di sektor energi dan lingkungan hidup,

yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program pembangunan yang ramah lingkungan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari Kota Pariaman, legislator Sumbar II ini melanjutkan perjalanannya ke Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Di sana, ia kembali menyapa masyarakat melalui silaturahmi bersama DPC dan para kader yang selama ini menjadi mitra perjuangannya.

Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung berbagai program yang telah diinisiasi.

Pada kesempatan tersebut, Nevi juga berdiskusi dengan para saksi dan relawan dari DPC dan DPRA,

BERIKUTNYA »»

Masa Reses, Nevi Zuairina Perkuat Silaturahmi dan Teguhkan Komitmen Advokasi

« SEBELUMNYA

meneguhkan kembali peran strategis mereka dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Kehadiran para saksi dan relawan ini adalah ujung tombak dari proses demokrasi yang sehat. Mereka adalah mitra kita dalam membangun daerah yang lebih baik,” tambahnya.

Silaturahmi yang dilakukan Nevi bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi juga bagian dari upaya untuk memastikan setiap suara masyarakat terwadahi.

Ia mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari isu-isu kesejahteraan sosial hingga kebutuhan mendesak di

bidang energi dan lingkungan. Semua aspirasi tersebut akan menjadi bahan perjuangan di Komisi XII DPR RI.

Dengan semangat kebersamaan, Nevi menutup kunjungannya dengan pesan harapan. Melalui silaturahmi yang penuh makna dan advokasi yang berkelanjutan, Hj. Nevi Zuairina terus membuktikan komitmennya sebagai wakil rakyat yang tak hanya hadir, tetapi juga berjuang untuk kepentingan masyarakat.

“Perjuangan ini adalah milik kita bersama. Saya akan terus hadir dan berjuang untuk masyarakat Sumatera Barat II, memastikan bahwa suara dan harapan kita tercermin dalam setiap kebijakan nasional,” pungkas Nevi Zuairina.



“Silaturahmi seperti ini bukan hanya mempererat hubungan personal, tetapi juga menjadi wadah untuk memastikan setiap aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan dan diperjuangkan,”

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



image istimewa

Kunker Studi Kelayakan, Meity Rahmatia Datangi Lapas Perempuan di Gowa Sulawesi Selatan

Kabupaten Gowa (21/12) — Menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Kabupaten Gowa, Jumat, (20/12/2024).

Pada kunjungannya ini, Meity yang terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan pada pemilihan Anggota legislatif 2024, bermaksud meninjau praktik manajemen pengelolaan Lapas sesuai undang-undang no 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Secara garis besar, kata Meity, UU No 22 Tahun 2022 mengatur asas sistem pemasyarakatan yang mengedepankan pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, dan lain-lain.

"Juga terkait fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamanan," ujar Meity.

"Yang tak kalah penting dalam UU ini adalah implementasi pemenuhan hak dan kewajiban tahanan, anak dan warga binaan," imbuhnya.

Kedatangan Meity disambut langsung ketua lapas perempuan kelas IIA I, Kabupaten Gowa, Yohani Wida yati bersama jajarannya.

Anggota DPR RI ini melaku-

kan dialog dengan pihak Lapas dan warga binaan. Dalam diskusi ini, Meity menjabarkan secara singkat substansi UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Usai diskusi, Meity meninjau fasilitas dan keadaan lingkungan Lapas perempuan.

Lapas perempuan kelas IIA Kabupaten Gowa dihuni oleh 366 warga binaan, 10 anak binaan. Menurut kepala lapas, 80 persen warga binaan terkait kasus narkoba.

Kehadiran Anggota DPR RI dari PKS di lapas ini disambut gembira Yohani. Ia mengaku gembira dan terharu karena dikunjungi sehingga bisa menyampaikan langsung aspirasi dan kebutuhan Lapas Perempuan ke anggota komisi tiga belas.

Yohani mengungkapkan mereka kekurangan tenaga medis dan psikolog. Menurutnya, warga binaan yang terdiri dari perempuan ini sangat butuh pendampingan psikolog.

BERIKUTNYA >>>

Kunker Studi Kelayakan, Meity Rahmatia Datangi Lapas Perempuan di Gowa Sulawesi Selatan

« SEBELUMNYA

"Saya merasa bahagia dan berterima kasih kepada beliau karena mengunjungi kami di sini."

"Kami bersyukur bisa menyampaikan langsung apa yang harus dibenahi dan dilengkapi di Lapas Perempuan Kelas IIA," ungkapnya.

Sementara itu, Meity dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi kepala

Lapas perempuan dan jajarannya.

"Insya Allah, saya akan perjuangkan. Saya juga perempuan, jadi saya sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu di dalam Lapas ini. Saya sendiri akan memperjuangkan kebutuhan psikolog ini agar bisa mendampingi ibu-ibu melewati masa-masa pembinaan di dalam Lapas dengan baik," jelasnya.

Dalam kesempatan ini,

Meity juga menyerahkan bantuan kursi untuk kebutuhan pelatihan warga binaan dalam lapas.

Selain Lapas perempuan, Aleg PKS yang dikenal aktif di sejumlah organisasi sosial di Sulsel ini, mengunjungi Lapas Narkoba yang juga berlokasi di Kabupaten Gowa.

Tujuan kedatangan Meity yaitu melihat langsung dan mengumpulkan data tentang praktik tata kelola atau manajemen Lapas.

Di Lapas ini, ia disambut baik oleh kepala lapas, sopin dan jajarannya. Meity diajak berkeliling melihat kondisi lapas, dari ruang tahanan, klinik, dapur umum, rumah ibadah hingga pusat pelatihan dan keterampilan warga binaan.

Sopin sangat mengapresiasi kehadiran Meity karena baru kali ini, mereka dikunjungi langsung oleh Aleg.

"Saya sangat berterima kasih, lembaga kami dikunjungi oleh Bu Meity. Ini jarang terjadi, seorang Aleg mau mengunjungi lapas, meninjau kondisi sampai di kamar-kamar warga binaan. Kami sangat berharap, beliau memperhatikan pemasyarakatan dan menjadikan hal-hal yang minus sebagai bahan kajian dalam rapat di DPR RI," jelas sopin yang memiliki pengalaman menjadi kepala lapas di berbagai daerah, termasuk Nusakambangan.



Secara garis besar, UU No 22 Tahun 2022 mengatur asas sistem pemasyarakatan yang mengedepankan pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, dan lain-lain. Juga terkait fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI



image istimewa



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif



Selamat *Hari Ibu*

22 Desember 2024

**"Terima kasih Ibu,
Perjuanganmu Inspirasiku"**

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
Bendahara Fraksi PKS DPR RI



fraksi.pks.id



[FPKS DPR RI](#)



[fraksipksdpri](#)



[@FPKSDPRI](#)



[PKS TV DPR RI](#)

Maknai Hari Ibu 2024 Anis Tegaskan Ibu Pilar Peradaban Bangsa

Jakarta (24/12) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menanggapi peringatan Hari Ibu yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember oleh masyarakat Indonesia.

Hari ibu, kata Anis, memiliki makna yang mendalam sebagai momen untuk menghormati dan mengapresiasi peran luar biasa seorang ibu dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Pada momen hari ibu tahun 2024 ini, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya tentang makna hari ibu. Anis menyampaikan buah pikirannya di Jakarta pada Ahad (22/12/2024).

Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengatakan bahwa peringatan Hari Ibu dapat dijadikan momen untuk lebih memahami nilai-nilai kasih sayang, pengorbanan, dan peran penting perempuan sebagai anak, istri, ibu, dan

anggota masyarakat.

"Peran ini menunjukkan bahwa perempuan diberikan peran paripurna yang sama dengan laki-laki namun memiliki fungsi dasar yang berbeda. Fungsi dasar seorang ibu yaitu melahirkan anak dan menyusuinya tidak bisa digantikan. Dan bersama para ayah, ibu mengasuh, membesarkan dan mendidik generasi untuk menjadi generasi tangguh pembangun keluarga, bangsa, negara dan agama," tutur Anis.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga menegaskan bahwa besarnya peran ibu bagi keluarga dan masyarakat, harus mendapatkan apresiasi. Tidak cukup dengan ucapan terima

kasih saja, namun apresiasi yang lebih untuk para ibu perlu dituangkan dalam program-program pemerintah. Ia menyarankan agar ditengah situasi ekonomi yang masih belum menentu saat ini pemberian edukasi dan perlindungan bagi kaum ibu perlu terus ditingkatkan.

"Pemerintah perlu memiliki edukasi khusus untuk kaum ibu. Seperti edukasi agar kaum ibu tidak terjatuh pinjol, agar kaum ibu tidak terjatuh judol, agar kaum ibu memiliki kesehatan mental yang baik, agar kaum ibu sejahtera, dan lain-lain," ungkapnya.

Fenomena lain yang nampak di berbagai lapisan masyarakat beberapa tahun terakhir adalah munculnya peran ibu sebagai penopang ekonomi keluarga.

Menanggapi fenomena ini, Anis yang juga seorang ekonom syari'ah menjelaskan bahwa kontribusi finansial seorang ibu untuk keluarganya memiliki nilai sedekah dalam agama. "Menjadi nilai plus bagi dirinya dihadapan Tuhannya," kata Anis.

Namun keterlibatan ibu dalam ekonomi keluarga ini sama sekali tidak menghilangkan tanggung jawab ayah untuk menafkahi keluarganya.

Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam bingkai cinta dan kasih sayang dalam naungan ketakwaan kepada Allah SWT untuk menjadikan



"Pemerintah perlu memiliki edukasi khusus untuk kaum ibu. Seperti edukasi agar kaum ibu tidak terjatuh pinjol, agar kaum ibu tidak terjatuh judol, agar kaum ibu memiliki kesehatan mental yang baik, agar kaum ibu sejahtera, dan lain-lain,"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI,
S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

keluarga sebagai tempat yang nyaman bagi tumbuh kembang semua anggota.

Anis menambahkan kaum ibu yang mampu melakukan aktifitas ekonomi untuk kelangsungan kehidupan keluarganya hingga menghasilkan anak-anak yang tangguh menjadi generasi penerus yang cemerlang,

merupakan kontribusi tersendiri bagi peradaban bangsa.

"Sejak dulu, kita melihat bagaimana kaum ibu konsisten menjadi pilar peradaban bagi bangsa dan negara dengan melahirkan generasi-generasi tangguh para pemimpin bangsa," tutupnya.



image istimewa

Peringati Hari Ibu, Nevi Zuairina Gelar Lomba Merangkai Bunga

Kabupaten Agam (24/12) — Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, Nevi Zuairina, anggota DPR RI dari Komisi XII, menggelar kegiatan Lomba Merangkai Bunga di Kabupaten Agam.

Acara yang sarat makna ini diselenggarakan bekerja sama dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) sebagai bagian dari agenda reses Nevi Zuairina untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat di daerah pemilihannya, Sumatera Barat II.

Acara Lomba Merangkai Bunga ini bertujuan untuk menggugah semangat kreativitas perempuan, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar warga di Kabupaten Agam.

Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan ini berlangsung meriah dengan menonjolkan nilai seni dan kecintaan terhadap lingkungan melalui keindahan rangkaian bunga.

Nevi Zuairina memberi pesan kepada seluruh relawan yang hadir di semua titik kegiatan yang tersebar di beberapa daerah, menyampaikan bahwa Hari Ibu adalah momentum untuk menghormati dan mengapresiasi peran perempuan, khususnya ibu, dalam keluarga dan masyarakat.

"Lomba Merangkai Bunga

ini adalah simbol penghormatan terhadap keindahan peran ibu yang selalu menghiasi kehidupan dengan kasih sayang, perhatian, dan ketulusan. Melalui kegiatan ini, kita ingin menegaskan pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga yang kokoh dan masyarakat yang harmonis," ujar Nevi.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan BPKK untuk terus mendorong program-program yang dapat memperkuat ketahanan keluarga.

Menurutnya, ketahanan keluarga adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi yang unggul dan bangsa yang maju.

Selain lomba, acara ini juga dirangkai dengan sesi edukasi singkat tentang pentingnya keterampilan kreatif bagi perempuan untuk mendukung perekonomian keluarga. Para peserta diberikan motivasi untuk memanfaatkan kreativitas mereka, seperti merangkai

BERIKUTNYA >>>

Peringati Hari Ibu, Nevi Zuairina Gelar Lomba Merangkai Bunga

« SEBELUMNYA

bunga, sebagai peluang usaha yang dapat memberikan nilai tambah.

Ketua BPKK Kabupaten Agam, yang turut hadir dalam acara ini, mengapresiasi inisiatif Hj. Nevi Zuairina.

"Kegiatan seperti ini sangat relevan dengan semangat Hari Ibu. Selain sebagai hiburan, lomba ini juga memberikan wawasan baru bagi para perempuan untuk lebih produktif dan kreatif," katanya.

Lomba Merangkai Bunga

ini menghasilkan banyak karya indah yang mencerminkan ketekunan dan bakat para peserta. Para pemenang lomba mendapatkan penghargaan berupa sertifikat, bingkisan, dan hadiah menarik lainnya.

Melalui kegiatan ini, Nevi Zuairina berharap semangat Hari Ibu terus hidup di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai peringatan tahunan, tetapi juga sebagai pemantik kesadaran akan pentingnya peran ibu dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.



"Lomba Merangkai Bunga ini adalah simbol penghormatan terhadap keindahan peran ibu yang selalu menghiasi kehidupan dengan kasih sayang, perhatian, dan ketulusan.

Melalui kegiatan ini, kita ingin menegaskan pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga yang kokoh dan masyarakat yang harmonis,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



image istimewa

Peringati Hari Anti Korupsi, Aleg PKS: Pentingnya Penanaman Nilai dan Pembiasaan di Keluarga untuk Cegah Korupsi

Jakarta (13/12) — Korupsi adalah permasalahan serius yang membutuhkan pendekatan holistik, termasuk penguatan nilai-nilai dasar dalam keluarga. Penanaman nilai kejujuran, rasa percaya diri, etika meminjam, dan pemahaman tentang hak milik sejak dini dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

Menurut Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetyani, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Dalam lingkungan keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan prinsip hidup yang benar.

"Keteladanan orang tua adalah kunci. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang

menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan akan membawa nilai-nilai itu hingga dewasa," ujar Netty pada Jumat, (13/12).

Ia menekankan pentingnya membiasakan anak-anak untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan menghindari perilaku tidak jujur seperti menyontek.

"Ajari anak untuk percaya bahwa usaha mereka sendiri akan membuahkan hasil, meskipun tidak langsung sempurna. Dengan begitu, mereka akan terbiasa menghargai proses, bukan hanya hasil," jelasnya.

Selain itu, Netty juga menggarisbawahi pentingnya pengajaran tentang etika meminjam dan hak milik.

"Anak-anak perlu diajarkan bahwa meminjam harus dengan izin dan mengembalikannya tepat waktu. Hal ini sederhana, tetapi jika diterapkan secara konsisten, akan membangun

"Anak-anak perlu diajarkan bahwa meminjam harus dengan izin dan mengembalikannya tepat waktu. Hal ini sederhana, tetapi jika diterapkan secara konsisten, akan membangun karakter yang menghargai milik orang lain,"

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

karakter yang menghargai milik orang lain," tambahnya.

Menurutnya, keluarga juga memiliki peran strategis dalam menciptakan kesadaran akan dampak buruk dari perilaku tidak jujur, termasuk korupsi. Dengan komunikasi yang baik antara anggota keluarga, nilai-nilai integritas dapat tertanam kuat.

"Menjelang tidur, misalnya, bisa menjadi waktu terbaik untuk berdiskusi santai. Orang tua dapat mendengar cerita anak-anak dan memberikan pandangan yang membangun," katanya.

Netty mengajak kepada seluruh keluarga di Indonesia untuk bersama-sama menciptakan generasi yang jujur, percaya diri, dan berintegritas.

"Memberantas korupsi adalah tugas kita semua. Dimulai dari keluarga, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.



*Turut
Berduka
Cita*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Prof. Dr. H. Awang Faroek Ishak

Gubernur Kalimantan Timur Periode 2008-2013 dan 2013-2018

Wafat di RSUD Kanujoso Djatiwibowo,
Balikpapan, Kaltim,
Minggu 22 Desember 2024.

Semoga Allah SWT menerima
amal ibadahnya serta
menempatkannya di tempat
terbaik Jannah-Nya
Amin



Apresiasi Perjuangan Rakyat Suriah,

HNW : Agar Dijaga Sehingga Jadi Jalan Palestina Merdeka

Jakarta (15/12) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, mendukung opini publik terkait perjuangan kedaulatan rakyat Suriah dengan tumbangnyanya rezim tirani Presiden Bashar Al Assad,

dan berharap agar capaian ini dijaga dengan benar, agar pengalihan kekuasaan dilakukan secara damai yang membuat Suriah menjadi lebih baik ke depannya.

"Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan pengakuan dan dukungannya terhadap pemerintahan yang baru ke depan, serta bekerja sama untuk menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945 secara konsisten," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (13/12).

HNW sapaan akrabnya juga berharap agar pemerintahan Suriah yang baru dan akan dibentuk ini dapat menjaga amanah masyarakat Suriah dan harapan masyarakat global, dengan maksimal, serta benar-benar menjaga kedaulatan

rakyat mereka dengan baik.

"Kedaulatan rakyat harus dijaga, agar tidak keluar dari satu masalah, tetapi justru masuk ke masalah baru," tukasnya.

Lebih lanjut, HNW juga mendukung negara-negara di dunia, baik negara-negara barat dan negara-negara Arab, yang telah menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan yang baru. Selain itu, ia juga mengapresiasi rencana Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lain sebagainya yang akan mencoretkan para kelompok perlawanan yang telah berhasil menumbangkan tirani Assad dari daftar teroris.

"Ini merupakan langkah yang sangat baik, karena kelompok-kelompok itu sejatinya merepresentasikan rakyat Suriah. Hal itu juga dibuktikan

dari euforia masyarakat Suriah, tidak hanya di dalam negeri, tetapi di mancanegara, yang merayakan kejatuhan rezim Tirani Assad ini," tuturnya.

Oleh karena itu, HNW berharap agar kedaulatan ini dapat dijaga dengan baik, termasuk dari upaya-upaya intervensi dari pihak luar, seperti dari Israel. Ia mengkritik keras sikap Israel yang melakukan intervensi militer terhadap Suriah pasca kejatuhan Assad tersebut.

"Israel bukan hanya menolak Resolusi PBB untuk segera menghentikan perang atau genosida di Gaza, Palestina, tetapi justru memanfaatkan konsentrasi sukses perjuangan Suriah yang mengelola transisi pemerintahan untuk diserang secara militer, termasuk memasuki wilayah Suriah, yakni Dataran Tinggi Golan," jelasnya.

HNW meminta agar pemerintahan Indonesia bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bahu membahu memaksimalkan perannya untuk lebih signifikan dan efektif dalam menciptakan



"Dan yang paling penting, kedaulatan rakyat Suriah yang telah terbebas dari Rezim Assad ini harus dapat menjadi pintu besar untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menghentikan penjajahan Israel, sehingga perdamaian abadi dan ketertiban dunia dapat diwujudkan,"

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

perdamaian dan anti penjajahan di kawasan Suriah, dan timur tengah tersebut.

"Dan yang paling penting, kedaulatan rakyat Suriah yang telah terbebas dari Rezim Assad ini harus dapat menjadi pintu

besar untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menghentikan penjajahan Israel, sehingga perdamaian abadi dan ketertiban dunia dapat diwujudkan," pungkasnya.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[@fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@FPKSDPRRI](https://twitter.com/FPKSDPRRI)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI



Tiktok
[@fraksipksdprri](https://www.tiktok.com/@fraksipksdprri)

***Nantikan
Setiap Pekan***